

TESIS



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DI MADRASAH
COKROKERTOPATI TAKERAN MAGETAN**



**OLEH
ULIL ABSHOR
NIM 502190068**

**PROGRAM MAGISTER PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021**

ABSTRACT

Pendidikan Diniyah Formal Policy is a policy for pesantren which has long held education in Islamic religious studies. This policy aims to ensure that pesantren can continue to maintain their religious studies through the formalization of their education. Based on that, the problem formulation in this study. *First*, how is the implementation of the Pendidikan Diniyah Formal policy at Madrasah Cokrokertopati. *Second*, how is the implementation of Pendidikan Diniyah Formal policy at the Cokrokertopati madrasah in terms of the input and the educational process. *Third*, what are the implications of the implementation of the Pendidikan Diniyah Formal policy for institutions. This study aims to critically analyze the problems of implementing the formal education policy formulated by the government in terms of four aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Then the implementation is reviewed from the aspects of the input and the educational process and implications for the institution. The type of research used in this research is qualitative field research, and the conditions in the field are described by the inductive method, while the approach used is the educational management approach and educational policy. And the presentation technique uses descriptive techniques. The focus of this research is madrasah Cokrokertopati as one of the madrasah that organize Pendidikan Diniyah Formal. The results of this study indicate that communication and coordination between policy makers is not tiered and structured, there is a disposition between policy makers and policy implementers. And implementation at the implementor level found that in terms of input there were teaching staff who had not met the standards, the curriculum standards were too high inadequate funding budget. while in terms of process, the management of Cokrokertopati madrasah is still not well

managed, learning planning is not yet a professional standard, management of the learning process is not effective, learning methods are not varied, assessment of learning outcomes is not in accordance with professional standards, there is no guidance and supervision from the government. And the implications of formal early education for institutions are Pendidikan Diniyah formalization paradigm, centralization and the segmentation of Islamic religious education services in non salafiyah pesantren.



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DI MADRASAH COKROKERTOPATI TAKERAN MAGETAN

ABSTRAK

Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal merupakan kebijakan bagi pesantren yang telah lama menyelenggarakan pendidikan kajian-kajian keagamaan Islam. Kebijakan itu bertujuan agar pesantren dapat terus mempertahankan kajian-kajian keagamaannya melalui formalisasi pendidikannya. Berdasarkan hal itu, rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati. *Kedua*, bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati dari segi input dan proses pendidikannya. *Ketiga*, Bagaimana implikasi implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal terhadap lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis permasalahan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal yang telah dirumuskan oleh pemerintah ditinjau dari empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian ditinjau implementasinya dari aspek input dan proses pendidikan kemadrasahannya dan implikasi terhadap kelebagaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif, dan kondisi dilapangan diuraikan dengan metode induktif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan. Dan tehnik penyajiannya menggunakan tehnik deskriptif. Fokus penelitian ini adalah madrasah Cokrokertopati sebagai salah satu madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa


komunikasi dan kordinasi antara pemangku kebijakan belum berjenjang dan terstruktur, terdapat disposisi antara pemangku kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Dan implementasi pada tataran implementor ditemukan bahwa dari segi input terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi standar, standar kurikulum terlalu tinggi, anggaran dana kurang memadai. sementara dari segi proses, manajemen madrasah Cokrokertopati masih belum terkelola dengan baik, perencanaan pembelajaran belum standar profesional, pengelolaan proses pembelajaran belum efektif, metode pembelajaran tidak variatif, penilaian hasil pembelajaran tidak sesuai dengan standar profesional, belum ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Dan implikasi Pendidikan Diniyah Formal terhadap kelembagaan adalah paradigma formalisasi Pendidikan Diniyah, sentralisasi dan segmentasi pelayanan pendidikan keagamaan Islam di pesantren non salafiyah.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Ulil Abshor, NIM 502190068 dengan judul: *"Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertohti Takeran Magetan"*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah Tesis

Ponorogo, 31 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Akshn, M.Ag
NIP.197407012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Teraakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AL-SURV/PT/11/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Ulil Abshor, NIM 502190068 Program Magister Prodi Pendidikan Islam dengan judul: *"Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertoпти Takeran Magetan"* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 14 April 2021 dan dinyatakan Lulus.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Nur Kolis, Ph.D. NIP.197106231998031002 Ketua Sidang		26/04/2021
2	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP.197602292008011008 Penguji Utama		26/04/21
3	Dr. Aksin, M.Ag NIP.197407012005011004 Anggota Penguji		26/04/21



Ponorogo, 14 April 2021
Dekan Pascasarjana,

Muhammad Huda, M.Ag.
NIP. 6051720021210

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulil Abshor
NIM : 502190068
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 April 2021

Penulis



Ulil Abshor

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Ulil Abshor, NIM 5021900683, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertapati Takeran Magetan)”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 31 Maret 2021

Pembuat Pernyataan,



Ulil Abshor
NIM. 502190068

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Diniyah merupakan pendidikan konservasi paradigma *tafaqquh fi al-dīni* yang telah lama diselenggarakan oleh pesantren, terutama pesantren salafiah. Sebagai bentuk rekognisi dan apresiasi atas usaha mencerdaskan anak bangsa serta keaktifan menyumbangkan sumber dayanya kepada bangsa dan negara, pemerintah melegitimasi Pendidikan Diniyah Formal sebagai pendidikan formal di pesantren melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan agama Islam.

Hingga saat ini tercatat sudah berdiri 49 Pendidikan Diniyah formal (PDF) di Indonesia.¹ Artinya fenomena perkembangan Pendidikan Diniyah Formal sangat signifikan. Namun dikawatirkan perkembangan itu tidak dikawal dengan sistem jaminan mutu. Berdasarkan penelitian yang telah

¹ Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam., 2020, 3500 Santri Pendidikan Diniyah Formal Ikuti Imtihan Watoni /Ujian Akhir. http://pendis.kemenag.go.id/.../3500_Santri_Pendidikan_Diniyah_Formal_Ikuti_Imtihan_Watoni/, {14 Januri 2020}, Diakses pada pukul 23.30 WIB.

dilakukan oleh Ahmad Dudin, peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan islam menjelaskan 30 % Pendidikan Diniyah Formal belum dibarengi dengan pengawalan konteks mutu secara profesional.² Artinya kebijakan Pendidikan Diniyah Formal belum berhasil, di lapangan terdapat permasalahan implementasi pada tataran madrasah serta masalah lain berkaitan jaminan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Sejalan dengan itu Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar (2018) menyatakan keberhasilan sebuah kebijakan sangat tergantung pada unit dan faktor implementornya.³

Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati yang berada lingkungan pesantren Takeran Magetan merupakan salah satu dan pertama kali menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal setelah mendapatkan progam *pilot project* dari pemerintah pada tahun 2014 lalu. berdasarkan peninjauan awal ditemukan. *Pertama*, Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati kurang diminati oleh masyarakat dibanding jenis pendidikan formal lainnya di lingkungan pesantren

² Ahmad Dudin, *Evaluation Of Implementation of Pendidikan Diniyah Formal (Formal Relegious Education) In Pesantren Darussalam Ciamis West Java*, Dialog Volume 42 Nomor 2 Desember 2019, 205-219.

³ Arwildayanto, Arifin Sukung, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press;2018)82.

Takeran.⁴ Artinya expektasi masyarakat umum terhadap Pendidikan Diniyah Formal belum terpenuhi dan Pendidikan Diniyah Formal belum mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih jenis pendidikan formal lainnya dari pada Pendidikan Diniyah Formal. *Kedua*, terdapat beberapa ustadz berasal dari lulusan pesantren salafiah yang tidak memiliki legalitas ijazah formal maupun belum pernah mengenyam bangku perkuliahan meskipun memiliki kualitas *mutafaqqih fī al-dīni* sehingga dikatakan tidak memenuhi kualifikasi akademik.⁵ *Ketiga*, mayoritas santri Cokrokertopati berasal dari keluarga kurang mampu, yatim dan *broken home* dan nakal menurut orang tua mereka.⁶

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas peneliti terdorong untuk menelisik bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dan implikasinya di Cokrokertopati. Dengan harapan potensi-potensi kegagalan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dapat segera diketahui dan diantisipasi.

⁴ Wawancara dengan Gus Aan, tanggal 10 Oktober 2020 di kediaman Kiai Zuhdi Tafsir.

⁵ Wawancara dengan Gus Aan tanggal 10 Oktober 2020 di kediaman Kiai Zuhdi Tafsir.

⁶ Wawancara dengan Kyai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 10 Oktober 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dari segi input dan proses pendidikan di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan ?
3. Bagaimana implikasi implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis kritis implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dari segi input dan output pendidikan di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan.

3. Untuk mendeskripsikan implikasi implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, dalam penelitian ini akan menghasilkan deskripsi hasil analisis lapangan tentang Pendidikan Diniyah Formal yang telah dirumuskan oleh pemerintah dilihat dari implementasinya pada unit implementor madrasah, dan implikasinya terhadap pesantren dan masyarakat, yang selanjutnya dapat dijadikan referensi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagai unit implementor lanjut dan Kementerian Agama sebagai *policy maker* untuk menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan Pendidikan Diniyah Formal di masa mendatang.

E. Survey Pustaka Terdahulu

Terdapat beberapa karya ilmiah dan penelitian yang membahas tentang Pesantren Cokrokertopati Takeran Magetan. Namun demikian belum ditemukan yang mengkaji secara khusus implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati Takeran Magetan. Melainkan penelitian dengan

objek yang sama dengan perspektif, metode penelitian dan pendekatan keilmuan yang berbeda.

Adapun penelitian yang menjadikan Cokrokertopati sebagai objek kajian namun menggunakan perspektif, metode penelitian dan pendekatan keilmuan yang berbeda dengan penulis diantaranya. *Pertama*, “Konsep Zuhud Perspektif Kiai Hasan Ulama dalam Naskah ‘Anīs al-muttaqīn” oleh Mas Tajudin Ahmad.⁷ Penelitian ini merupakan kajian filologi yang berupaya menganalisis isi kitab yang menjadi pegangan Kiai Zuhdi Tafsir dalam mengajar kepada santri Cokrokertopati dan masyarakat. Kitab tersebut merupakan manuskrip kuno Kiai Hasan Ulama yang menjadi koleksi pribadi Kiai Zuhdi Tafsir. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konsep dunia yang dipaparkan oleh Kiai Hasan Ulama berbeda dengan konsep zuhud yang diusung oleh ulama modern. Perspektif Kiai Hasan Ulama cenderung memandang dunia sebagai sesuatu yang hina dan perlu dihindari. Sedangkan ulama modern menganggap dunia merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia.

⁷ Mas Tajudin Ahmad, *Konsep Zuhud Perspektif Kiai Hasan Ulama dalam Naskah ‘Anisul Muttaqin*, Tesis Progam Pasca Sarjana UIN Yogyakarta.2016.

Kedua, “Implementasi Pembelajaran Literasi Sains untuk meningkatkan daya fikir kritis peserta didik Cokrokertopati Takeran Magetan” oleh Muhammad Taufiq dan Munif Chatib.⁸ Dalam penelitian ini peneliti yang dalam tugas pengabdian melakukan eksperimen untuk menguji bagaimana pengaruh literasi sains terhadap daya berpikir kritis santri Cokrokertopati. Literasi merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang beraneka-ragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Dan dari hasil penelitian menunjukkan implementasi literasi sains berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis santri, data menunjukkan sebelum pembelajaran dilakukan kemampuan berpikir kritis santri dari jumlah 40 santri kelas VII dengan rata-rata 32,08, setelah pembelajaran, rata-rata skor yang dicapai 82,50 sehingga hasil rata-rata skor setelah pembelajaran lebih tinggi daripada sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran dilakukan kemampuan berpikir kritis siswa dengan jumlah persentase 30% masuk dalam kategori kurang. Setelah dilakukan pembelajaran,

⁸ Muhammad Taufiq, Munif Chatib, Community Development Journal, Volume 2, No. 1 Juli 2018 ISSN 2580-5282

tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan jumlah persentase 80% mencapai kategori baik.

Ketiga, “analisis *fun English* : permainan menyusun *Noun Prashe* dalam rangka meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik di Cokrokertopati” oleh Edi Pujo Basuki dan Naiul Authar .⁹ Penelitian ini bertujuan mengungkap pengaruh *fun English game* dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris peserta didik sekaligus menjadi modeling bagi tenaga pendidik dalam mengajar bahasa Inggris. Dalam penelitian ini peneliti melakukan *experiment* pengajaran bahasa Inggris dengan menggunakan permainan, yaitu permainan menyusun kata - kata acak menjadi suatu frasa yang benar. Dan hasil penelitian itu adalah *fun English game* berdampak kepada kemampuan bahasa Inggris peserta didik.

F. Metode Penelitian

Secara spesifik, kajian terhadap masalah yang telah dikemukakan diatas akan diuraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁹ Edi Pujo Basuki, Nailul Authar, *Community Development Journal*, Volume 2, No. 1 Juli 2018 ISSN 2580-5282

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu dengan menguraikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. dengan pertimbangan itu penelitian ini berusaha menganalisis dan mendeskripsikan data, fakta dan keadaan maupun disposisi yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis dan prediksi tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai keadaan yang dikehendaki. Deskripsi tersebut diperoleh dengan cara mencatat wawancara sumber data dan tindakan-tindakan yang di amati dilokasi penelitian secara berulang-ulang sampai jenuh.¹⁰

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu menguraikan contoh-contoh konkrit dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.

3. Pendekatan

Manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan memiliki hubungan simbiosis. Karena tanpa adanya sinergi dari keduanya maka pendidikan tidak akan berjalan

¹⁰ Robert C. Bogdan & S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: John Wiley, 1975), 5.

maksimal, baik secara konseptual (perencanaan) maupun dalam implementasinya. Berdasarkan hal itu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah pendekatan *kebijakan pendidikan* dan *manajemen pendidikan*.

4. Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah mengkaji kerangka teori kearah pengembangan strategi. kemudian dianalisis sesuai kepustakaan yang relevan. Sedangkan fakta yang terjadi dilapangan diangkat berdasarkan *case study* dan tehnik penyajiannya menggunakan analisis *deskriptif* dalam rangka mencari sebuah gambaran implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati Takeran Magetan sekaligus mengetahui karakteristik manajemen risiko didalamnya.

5. Fokus Penelitian

Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2014 dan tergolong sebagai kebijakan yang baru. Dan salah satu yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal adalah Cokrokertopati yang berada di Takeran Magetan Jawa Timur. Karena keterbatasan peneliti dan guna mendapatkan

kajian yang spesifik dan diperoleh data-data yang relevan maka peneliti melakukan pembatasan masalah.

Setelah melakukan penjajakan awal ditemukan hal-hal yang mengindikasikan adanya permasalahan pada implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal. Berdasarkan hal tersebut peneliti membatasi ruang lingkup penelitian kepada implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati.

6. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu data-data yang yang diperoleh melalui observasi dan wawancara aktor-aktor atau informan kunci yang berkaitan dengan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati. Dan informan tersebut adalah (1) Pengasuh pesantren Takeran Kiai Zuhdi Tafsir (2) Ketua yayasan Cokrokertopati Moch Choirul Anam (Gus Aan) (3) Kepala madrasah Cokrokertopati ustadz Ulin Nuha.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data-data yang terdapat dalam buku, artikel, jurnal dan dokumen yang langsung maupun tidak langsung memiliki relevansi dengan penelitian ini.

7. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini supaya memperoleh data yang valid dan tepat adalah dengan :

a. Wawancara

Setelah melakukan koordinasi dengan Dr. Moch. Choirul Anam M.Pd.I selaku ketua Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati, Peneliti diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada aktor-aktor yang terdapat di madrasah Cokrokertopati, diantaranya Dr. Moch. Choirul Anam M.Pd.I sendiri, Kiai Zuhdi Tafsir, ustad Ulin Nuha dan ustad Agus Mutok.

Melalui wawancara ini peneliti menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subjek penelitian ini. Tehnik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilakukan tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara semata. Lebih dari itu wawancaranya dapat diperdalam dan dikembangkan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan kejadian-kejadin dan tindakan-tindakan di lokasi penelitian secara periodik

kemudian dijadikan sebagai catatan lapangan setelah memperoleh izin dari yang berwenang dalam lokasi penelitian itu.

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data non insani berupa dokumen-dokumen dan rekaman wawancara dan rekaman fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

8. Tehnik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti maka peneliti melakukan proses analisis sebagai berikut:

- a. Menyederhanakan, memilah dan menilai data yang relevan dan penting dalam mendukung argumen dalam penelitian yang akan dilaporkan oleh peneliti.
- b. Menyajikan dan mentafsirkan data hasil penelitian untuk menemukan keterkaitan dengan kerangka teori dan membangun teori-teori baru.
- c. Mencari pola-pola hubungan dan persamaan dari fenomena-fenomena yang terjadi dengan membuat kesimpulan sehingga makna-makna dibalik data dapat diketahui. Kemudian setelah itu meninjau ulang dan mempertanyakan kembali hasil catatan lapangan.

G. Kerangka Teori

Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai reaksi munculnya problematika pendidikan, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.¹¹ Berkaitan dengan hal itu hadirnya Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal diharapkan dapat menjadi solusi bagi pesantren yang ingin mempertahankan tradisi keilmuannya atau ingin menghidupkan kembali tradisi itu yang telah lama hilang di dalam pesantren. Sekaligus memiliki standar kualifikasi, kurikulum standar dan sistem jaminan mutu.

Berdasarkan temuan dilapangan terdapat potensi akan kegagalan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal mengingat akan adanya problematika yang ada di tataran implementor. Hal itu mengindikasikan terdapat masalah dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal. Berangkat dari hal itu peneliti ingin menganalisis tingkat keberhasilan unit implementor dalam mengimplementasikan kebijakan

¹¹ Arwildayanto, Arifin Suling, Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif, (Bandung: Cendekia Press;2018)15.

Pendidikan Diniyah Formal yang dilakukan oleh tataran implementor dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten Magetan dan Pendidikan Diniyah Cokrokertopati. Sementara teori yang hendak diterapkan oleh peneliti adalah teori implementasi kebijakan Edward III.

Edward III dalam Arwildayanto, Arifin Sucing dan Warni Tune Sumar (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang saling berkaitan dalam implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan.¹² Empat variable tersebut sebagai berikut :

1. Komunikasi

Kebijakan akan berjalan optimal jika terdapat komunikasi efektif antara *policy maker*, implementor dan kelompok sasaran. Sehingga tujuan dan sasaran program dapat ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran dengan harapan dapat mengantisipasi distorsi atas kebijakan dan program yang sudah ditetapkan.

¹² Arwildayanto, Arifin Sucing, Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press;2018), 92.

Adapun indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu :

- a. Tranmisi, penyaluran komunikasi dengan baik untuk menghindari *misscommunication*.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima implementor maupun sasaran kebijakan harus jelas dan tidak ambigu.
- c. Konsistensi, perintah dalam implementasi kebijakan haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan.

2. Sumber Daya

Tersedia sumber daya yang memadai berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang akan diterapkan. sehingga progam-progam kebijakan dalam tataran implementor dapat berjalan optimal. Sementara indikator dalam ketersediaan sumber daya yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Staf, sebagai sumber daya utama yang memiliki keahlian dan kompetensi.
- b. Informasi, ketersediaan informasi yang berkaitan dengan tata cara implementasi kebijakan pendidikan dan informasi atau data kepatuhan implementor dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Wewenang, yaitu otoritas atau legitimasi implementor dalam pelaksanaan kebijakan.

- d. Fasilitas, ketersediaan fasilitas sangat mendukung keberhasilan staf dalam melaksanakan implementasi kebijakan.
- e. Finansial, ketersediaan sumber daya finansial menunjukkan kecukupan modal investasi dalam program kebijakan pendidikan.

3. Disposisi

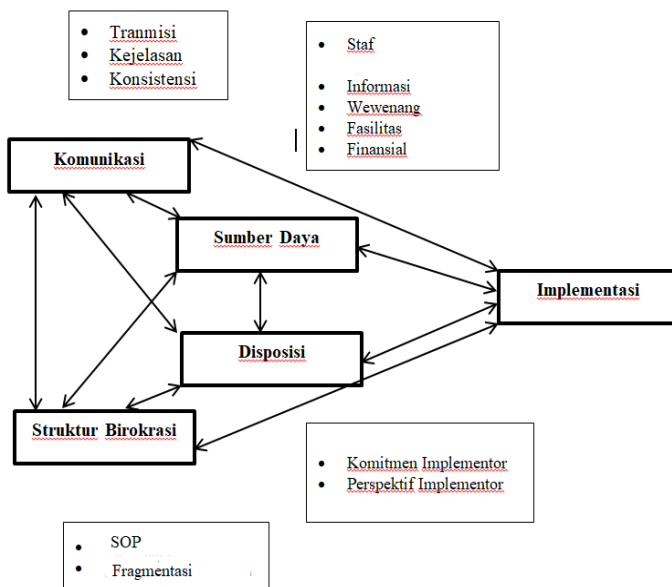
Disposisi atau sikap yang selaras dengan kebijakan yang telah dirumuskan *policy maker*. Apabila komitmen implementor maupun perspektif implementor berseberangan dengan tujuan kebijakan maka potensi kegagalan kebijakan maupun implementor semakin besar. Adapun indikator disposisi implementor adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan selaras dengan tujuan kebijakan.
- b. Perspektif implementor dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Keefektifan struktur birokrasi atau organisasi mencerminkan pembagian kerja dan tanggung jawab pada setiap unit sehingga alur koordinasi dan komunikasi terlihat jelas. Sementara indikator keefektifan struktur birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Tersedia *standard operating procedure* (SOP), yaitu sebuah sistem yang bertujuan merapikan, menertibkan dan mempermudah keorganisasian.
- b. Terdapat fragmentasi atau pembagian unit kerja yang menunjukkan rentang kendali antara pimpinan dan bawahan.



Gambar 1.1 : Faktor penentu implementasi

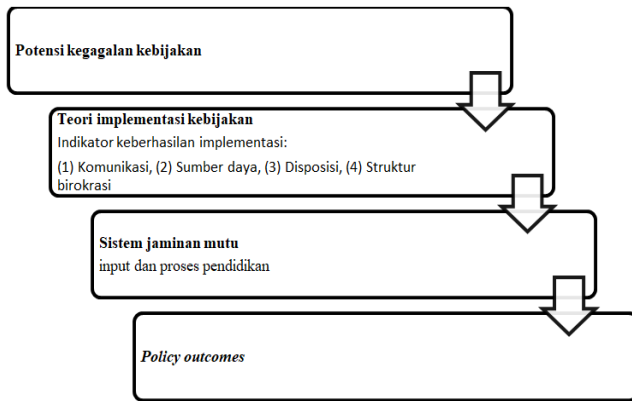
Dalam kebijakan pendidikan, madrasah merupakan ujung tombak implementor. Keberhasilan kebijakan dalam pendidikan tergantung bagaimana madrasah mampu mengimplementasikan kebijakan pendidikan melalui kendali sistem jaminan mutu, yaitu kendali input dan proses

pendidikan.¹³ Dan komponen-komponen input dalam pendidikan adalah pengelola, tenaga pendidikan dan kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana dan pembiayaan. Sementara komponen-komponen proses adalah pengelolaan satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan penilaian peserta didik terhadap proses pembelajaran.¹⁴

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai *policy goal* pendidikan melalui proses yang sesuai dengan prosedur sebagai sistem jaminan mutu. Sehingga *policy outcomes* dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder pendidikan dari *policy maker*, *implementor* dan *customer* pendidikan.

¹³ H.A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung : Pustaka Setia : 2015), 55.

¹⁴ Ahmad Jamin. "Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Sistem (transformasi Input Menuju Output Yang Berkarakter)." *Islamika*15, no. 2 (August 18, 2016).181.



Gambar 1.2 : Kerangka Teori Implementasi Kebijakan

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini peneliti menyusun menjadi 6 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penyusunan tesis ini terdiri dari :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

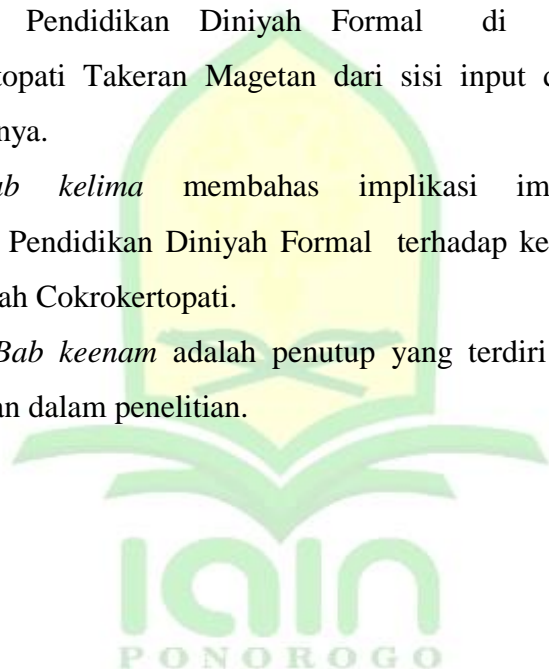
Bab kedua menjelaskan tentang deskripsi madrasah Cokrokertopati yang meliputi sejarah singkat berdirinya madrasah Cokrokertopati, visi misi dan tujuan, kondisi tenaga pendidik dan kependidikan dan kondisi peserta didik.

Bab ketiga membahas hasil temuan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Bab keempat membahas hasil temuan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan dari sisi input dan output madrasahnyanya.

Bab kelima membahas implikasi implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal terhadap kelembagaan di madrasah Cokrokertopati.

Bab keenam adalah penutup yang terdiri dari hasil dan temuan dalam penelitian.



BAB II
PROFIL LEMBAGA
PENDIDIKAN DINIAH FORMAL
MADRASAH COKROKERTOPATI

A. Lokasi Madrasah Cokrokertopati

Madrasah Cokrokertopati terletak di Jalan Rogojati I Rt.02 Rw.01 kelurahan Takeran Kecamatan Takeran kabupaten Magetan provinsi Jawa Timur, tepat di samping pintu masuk area komplek pesantren Takeran dengan gedung berwarna hijau. Disisi jalan raya tepat disamping gedung Cokrokertopati terdapat baliho setinggi tiga meter bergambar Kiai Zuhdi Tafsir yang mempublikasikan jenis pendidikan yang berada dibawah Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati, yaitu Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati dan Ma'had Aly Cokrokertopati.

B. Sejarah Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati

Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati secara resmi berdiri pada tahun 2014 lalu bersamaan dengan 13 pesantren lainnya di seluruh Indonesia yang mendapatkan

progam *pilot project* dalam rangka upaya mempertahankan paradigma *tafaqquh fi al-dīn* di lingkungan pesantren. dan 13 pesantren yang mendapatkan SK pendirian Pendidikan Diniyah Formal pertama tersebut adalah Nurul Qodim Probolinggo Jawa Timur, al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri-Jawa Timur, al-Fithrah Surabaya-Jawa Timur, Zainul Hasan Genggong Probolinggo-Jawa Timur, Nurul Kholil Bangkalan-Jawa Timur, APIK Kaliwungu Kendal-Jawa Tengah, al-Mubarak Manggis Wonosobo-Jawa Tengah, al-Masturiyah Sukabumi Jawa Barat, Darussalam Ciamis Jawa Barat, Nahdlatul Ulum Maros-Sulawesi Selatan, As`adiyah Sengkang Wajo-Sulawesi Selatan, al-Khairaat Tanjung Selor-Kalimantan, Babussalam Aceh Utara-Aceh.¹⁵

Latar belakang berdirinya Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati diawali pendirian Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati pada tahun 2009. Dan hadirnya Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati bermula dari keinginan KH.MS.Zuhdi Tafsir,S.Ag seorang Kiai nyentrik dan tokoh silat di Magetan yang merupakan kepala keluarga kecil bagian dari keluarga besar Pesantren Takeran yang sejak dahulu

¹⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS; Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Agama Islam (1996/1997), *Informasi Perguruan Agama Islam*, hal. 19.

diberikan “Kotak” atau wewenang untuk mengelola masjid dan kepesantrenan Pesantren Takeran untuk kembali menghidupkan nilai-nilai tafaqquh fi al-dini.¹⁶

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh peneliti, keinginan KH. MS. Zuhdi Tafsir, S.Ag. untuk mendirikan Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati cukup berasal. *Pertama*, keadaan generasi muslim yang kurang cakap dan paham tentang ilmu agama Islam khususnya kitab-kitab kuning.¹⁷ *Kedua*, “*Sekolah nyambi mondok*” atau sekolah sambil mondok, yaitu kondisi pesantren menjadi *second choice* yang kalah dominan dengan pendidikan umum yang menyebabkan minimnya konsentrasi keagamaan bagi peserta didik¹⁸. *Ketiga*, animo masyarakat terhadap pendidikan formal dibawah pesantren takeran yang sudah dinegerikan oleh pemerintah maupun tidak dinegerikan sangat tinggi, namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan peminat terhadap pesantrennya. Disisi lain kondisi tersebut menjadikan nilai-nilai kepesantren sulit diterapkan pada pendidikan formal

¹⁶ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 10 Oktober 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 10 Oktober 2020.

¹⁸ Wawancara dengan Gus Aan di kediaman Kiai Zuhdi Tafsir pada 10 Oktober 2020.

dilingkungan Pesantren Takeran.¹⁹ *Keempat*, upaya segmentasi pendidikan keagamaan di lingkup Pesantren Takeran. Hal-hal itu diantaranya yang mendorong KH.MS.Zuhdi Tafsir,S.Ag. mengundang dan mengajak para tokoh Agama maupun para tokoh masyarakat untuk urun rembuk memikirkan kondisi-kondisi diatas, dengan dukungan dan semangat dari para tokoh agama dan masyarakat disertai dengan niat yang kuat maka berdirilah Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Cokrokertopati pada tanggal 01 Mei tahun 2009. Pada pertemuan itu ditetapkanlah KH.MS.Zuhdi Tafsir,S.Ag sebagai pengasuh dan Dr.Moch Choirul Anam, M.Pd.I Sebagai ketua yayasan. dan sejak tahun tersebut sampai turunnya SK Pendidikan Diniyah Formal pada tahun 2015 Cokrokertopati mengikuti progam Wajar Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Nasional).

Secara historis pendirian Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati sangat berkaitan erat dengan Pesantren Takeran yang didirikan pada tahun 1886 oleh Kiai Hasan Ulama seorang mursyid tarekat Shaththariah ((1873-1916) yang lebih dikenal dengan washitah, dan Munawar Rahmat menyebutnya sebagai seorang pioneer pesantren modern yang memadukan

¹⁹ Wawancara denga Gus Aan di kediaman Kiai Zuhdi Tafsir pada 10 Oktober 2020.

keunggulan sistem pesantren dan sekolah.²⁰ Sedangkan Kiai Hasan Ulama sendiri merupakan putra dari Pangeran Cokrokertopati yang memiliki gelar Kiai Kholifah dan beliau merupakan prajurit sekaligus guru spiritual Pangeran Diponegoro. Berdasarkan hal itu, para pendiri dan para pengasuh memberikan nama pesantren dengan Cokrokertopati sebagai bentuk *ta'diman* dan *tafa'ulan* kepada Pangeran Cokrokertopati.

C. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Cokrokertopati

Hadirnya Cokrokertopati adalah dalam rangka *nguri-nguri* atau memelihara karakteristik Pesantren Takeran sebagai madrasah tasawuf pada awal berdirinya. Berdasarkan hal itu Kiai Zuhdi Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan diniyah formal Cokrokertopati dalam rangka membumikan nilai-nilai tasawuf dan meleburkannya dalam dunia pendidikan seperti halnya konsep yang telah digagaskan oleh para pendahulunya. Konsep utama dalam pendidikan diniyah formal Cokrokertopati adalah petikan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya "*Bukankah Aku ini adalah Tuhanmu ?*"

²⁰ Munawar Rahmat, *Kiai Hasan Ulama Mursyid Tarekat Shaththariah As a Pioneer of Modern Pesantren*, Islamic Religious Education Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jurnal Pendidikan Islam :: Volume 7, Nomor 1, June 2018/1439

mereka menjawab, “Betul, (engkau Tuhan Kami), kami bersaksi.” Yaitu menerapkan pendidikan kesadaran diri akan hakikat dan tujuan manusia sebagai abdi Allah Subhanu Wa Ta’ala. Menjadikan keimanan menjadi pedoman dan mengimplementasikan keimanan tersebut dalam bentuk kesalihan individu maupun kesalihan sosial. Disisi lain konsep Al-A’raf 172 tersebut juga menjadi dasar penghilangan pembaiatan tarekat syattariyyah di Takeran Dihilangkan, dengan alasan pada hakikatnya manusia sudah berbaiat kepada Allah Subhanu Wa Ta’ala sebelum ia dilahirkan.²¹

1. Visi

Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati *sebagai Markaz at-Turāst al-Islāmī* dalam rangka mewujudkan generasi muslim yang berilmu, beramal dan bertaqwa.

2. Misi

- a. Menghasilkan kader *Mutafaqqih fi al-Dīni* yang unggul dalam kajian *kutub at-turast*.
- b. Menghasilkan peserta didik yang memiliki kesalihan individu dan kesalihan sosial di kalangan peserta didik dan masyarakat.

²¹ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 10 Oktober 2020.

- c. Menghasilkan peserta didik yang berkarakter da'i yang mampu bersosialisasi dengan seluruh lapisan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Melayani kajian keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Menyiapkan kaderisasi ulama yang moderat.
- c. Menyiapkan peserta didik sebagai abdi masyarakatnya.

4. Motto

- a. Muslim Berilmu : adalah sosok manusia muslim yang memiliki kecakapan tentang ilmu keagamaan islam.
- b. Muslim Beramal : adalah sosok manusia muslim yang dapat mengejawentahkan keilmuan-keilmuan yang ia miliki dalam kehidupannya.
- c. Muslim Bertaqwa : adalah sosok manusia yang memiliki kesalihan individu maupun kesalihan sosial.

D. Struktur Organisasi

Kiai Zuhdi Tafsir sebagai pendiri Cokrokertopati dan pengasuh kepesantren, sekaligus Tokoh Masyarakat yang memiliki jamaah tersendiri yaitu jamaah pemelihara ritual-ritual atau mujahadah Pesantren Takeran, Jamaah persilatan di wilayah Magetan maupun Madiun, beliau menjadi ketua komite pendidikan diniyah Formal Cokrokertopati bersama

tokoh-tokoh masyarakat lain dan wali peserta didik. Sedangkan menantu beliau yaitu Moch. Choirul Anam, atau lebih dikenal Gus Aan sebagai motor Cokrokertopati didapuk menjadi kepala yayasan Cokrokertopati yang mengurus bidang-bidang dibawah Cokrokertopati termasuk Pendidikan Diniyah Formalnya.

Sedangkan kepala madrasah sejak Pendidikan Diniyah Formal berdiri tahun 2015, ketua yayasan menunjuk tenaga pendidik Ulin Nuha yang telah lama berkecimpung di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Tegal Arum Takeran Magetan sebagai Kepala Pendidikan Diniyah Formal, dan beliau juga merupakan alumni Lirboyo dan Maunah sari Kediri Jawa Timur.

Adapun untuk bendahara, sekretaris dan tata usaha diberikan kepada alumni-alumni dalam rangka pengabdian kepada madrasah dan pengembangan kompetensi. Untuk bendahara diserahkan kepada Tenaga pendidik Mufid, sekretaris tenaga pendidik Agung Hendra Prastyo dan tata usaha tenaga pendidik Imam. sedangkan untuk kurikulum diserahkan kepada tenaga pendidik Agus Mutok yang dulunya merupakan tenaga pendidik bantu yang dikirim oleh KH.Lukman Harist Dimiyati Tremas Pacitan dalam rangka

pembinaan Pesantren Cokrokertopati di awal berdirinya di bidang kepesantrenan dan kurikulum pesantren.²²

Dan yang ditunjuk oleh ketua yayasan untuk menjadi kepala dibidang kepeserta didikan adalah tenaga pendidik M. Wahekotin. Dan untuk humas adalah tenaga pendidik Alim Rohmatullohi.

1.	Ketua Yayasan	Dr. Moch Choirul Anam, M.Pd.I
2.	Komite	KH.MS.Zuhdi Tafsir,S.Ag
3.	Kepala Ulya	Ulin Nuha S.Pd
4.	Kepala Wustho	Ulil Abshor LC
5.	Bendahara	Ahmad Mufid
6.	Sekretaris	Agung Hendra Prasetyo
7.	Kurikulum	Agus Mutok, S.Pd
8.	Kepeserta didikan	M. Wahekotin, S.Pd
9.	Humas	Alim Rohmatullohi, S.H
10.	Tata Usaha	Imam S.H

Tabel 2.1 : *Struktur Organisasi Madrasah Cokrokertopati.*²³

E. Kurikulum Madrasah Cokrokertopati

Madrasah Cokrokertopati menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum yang dikembangkan dengan landasan filosofis memberikan dasar

²² Wawancara dengan Gus Aan 15 Oktober di gazebo Cokrokertopati pada 15 Oktober 2020.

²³ Dokumen Yayasan Perguruan Islam YPI Cokrokertopati.

bagi upaya pengembangan kapasitas peserta didik menjadi manusia yang menguasai ilmu-ilmu agama berbasis kitab kuning. Pemerintah dalam hal ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan diniyah formal untuk memilih diantara sumber-sumber kitab yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati pada Tingkat Wustho dan Ulya berupa pilihan strategis untuk mencerdaskan para peserta didik. Kurikulum ini disusun dan dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, mengembangkan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial, rasa keingintahuan, kreativitas, kerja sama dan etos kerja dengan mendayagunakan kemampuan intelektual dan psikomotorik. *Kedua*, lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan terencana, sehingga peserta didik dapat menerapkan apa yang dipelajari di madrasah untuk masyarakat dan dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. *Ketiga*, mengembangkan pengetahuan, sikap spiritual dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai kondisi dan situasi di madrasah maupun masyarakat. *Keempat*, memberi keleluasaan untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan. *Kelima*, kompetensi berisi kompetensi

inti kelas yang telah dirinci dalam kompetensi dasar mata-pelajaran. *Keenam*, kompetensi inti merupakan pengorganisasian kompetensi dasar, dan semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi inti. *Ketujuh*, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif dan intregratif, yaitu saling memperkaya, memperkuat dan mensinergikan antar mata pelajaran.²⁴

Dan berikut ini adalah tabel mata pelajaran madrasah Cokrokertopati :²⁵

	Mata Pelajaran	Sumber Kitab		
		Kelas 10	Kelas 11	Kelas 12
1	Al-Qur'an & Tajwid	Tahsin al-Qur'an	Tuhfat al-Athfal	Jazariyah
2	Tafsir & Ilmu Tafsir	Tafsir Jalalayn, Ibriz & al-Itqan	Tafsir Jalalayn , Ibriz & al-Itqan	Tafsir Jalalayn, Ibriz & al-Itqan
3	Hadits & Ilmu Hadits	Hadits Arba'in	Muhtar al-Hadits	Muhtar al-Hadits
4	Akidah / Tauhid	Majmu'ah al-Aqidah Jilid 1	Majmu'ah al-Aqidah Jilid 1	Majmu'ah al-Aqidah Jilid 2
5	Fikih & Ushul Fikih	Durus al-Fikhiyah Jilid 3	Taqrib	Taqrib
6	Akhlak / Tasawuf	Akhlak al-Banin Jilid 3	Akhlak al-Banin Jilid 4	Sulam al-Taufiq
7	Tarikh	Khulashoh Nurul Yakin Jilid 2	Khulashoh Nurul Yakin Jilid 2	Khulashoh Nurul Yakin Jilid 3
8	Bahasa Arab	Al-Arabiyyah Bayna Yadayk	Al-Arabiyyah Bayna Yadayk	Al-Arabiyyah Bayna Yadayk

²⁴ Wawancara dengan ustadz Agus Mutok di kantor madrasah pada 15 Desember 2020.

²⁵ Dokumen Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati yang diberikan oleh Ustad Fatkhur Ridwan.

		&al-Arabiyyah li al-Nasyu'in	&al-Arabiyyah li al-Nasyu'in	&al-Arabiyyah li al-Nasyu'in
9	Nahwu	Jurumiyah & Muthamimah	Jurumiyah & Muthamimah	Alfiyah Ibnu Malik
10	Sharaf	Kailani, Tashrif Lughowi & Ma'nawi	Yaqulu, Tashrif Lughowi & Ma'nawi	I'latul Kalimat
11	Balaghah	Al-Jauhar al-Maknun	'Uqud al-Juman	'Uqud al-Juman
12	Ilmu Kalam	Al-Iqtishad fi al-I'tiqad	Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah	Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah
13	Ilmu Arudh	–	Al-Mukhtashar al-Syafi ala Mantn al-Kafi & Al-Muyassar fi ilm al-Rudh	Al-Mukhtashar al-Syafi ala Mantn al-Kafi & Al-Muyassar fi ilm al-Rudh
17	Ilmu Mantiq	Ilmu Mantiq (M. Nur Ibrahim)	Al-Sulam al-Munawroq fi Ilm al-Manthiq	Al-Sulam al-Munawroq fi Ilm al-Manthiq
18	Ilmu Falaq	–	Al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falak bi Jadawil al-Lugharitmiyah	Al-Khulashah al-Wafiyah fi al-Falak bi Jadawil al-Lugharitmiyah
19	Bahasa Arab	Arobiyyah Baina Yadaik	Arobiyyah Baina Yadaik	Arobiyyah Baina Yadaik
20	Bahasa Indonesia			
21	Pendidikan Kewarganegaraan	Ahkam Sultoniyyah	Ahkam Sultoniyyah	Ahkam Sultoniyyah
22	IPA			
23	Matika			
24	Seni Budaya	Silat, Barzanji, Diba', Manaqib	Silat, Barzanji, Diba', Manaqib	Silat, Barzanji, Diba', Manaqib

Tabel 2.2 : Mata pelajaran madrasah Cokrokertopati

	Mata Pelajaran	Sumber Kitab		
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9
1	Al-Qur'an & Tajwid	Tahsin Qur'an	Tuhfat al-Athfal	Jazariyah
2	Hadits & Ilmu Hadits	Lubab al-Hadits	Lubab al-Hadits	Hadits Arba'in
3	Akidah / Tauhid	Qothr al-Ghaist	Nurudh al-Dholam, Husun Hamidiyah	Tijan ad-Daruri
4	Fikih & Ushul Fikih	Durus al-Fikhiyah Jilid 1	Durus al-Fikhiyah Jilid 2	Safinah
5	Akhlaq / Tasawuf	Akhlaq al-Banin Jilid 1	Akhlaq al-Banin Jilid 1	Akhlaq al-Banin Jilid 1
6	Tarikh			
7	Bahasa Arab	Durus al-lughoh	Durus al-lughoh	Durus al-lughoh
8	Nahwu	Qowaid al-Nahwi	Jurumiyah	Imriti
9	Sharaf	Qowaid al-Shorfi	Kailani, Tashrif Lughowi & Ma'nawi	Kailani, Tashrif Lughowi & Ma'nawi
10	Bahasa Indonesia			
11	Pendidikan Kewarganegaraan			
12	IPA			
13	Matika			
24	Seni Budaya	Silat, Barzanji, Diba', Manaqib	Silat, Barzanji, Diba', Manaqib	Silat, Barzanji, Diba', Manaqib

Tabel 2.3 : Mata pelajaran Cokrokertopati.

sumber : dokumen Cokrokertopati tenaga pendidik Fatkhur
Ridwan.

F. Tenaga pendidik dan kependidikan

Penerapan kurikulum yang berbasis kitab kuning pada Pendidikan Diniyah Formal menuntut Cokrokertopati untuk merekrut tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang kajian kitab kuning untuk mengampu mata pelajaran yang telah ditetapkan.

No	Nama	Mata Pelajaran	Alumnus Pesantren	Pendidikan Terakhir
1.	Dr. Moch Choirul Anam, M.Pd.I	Tafsir	Al-Fitrah Surabaya, Kewagean Kediri	UIN Jogjakarta
2.	Ulin Nuha, S.Pd.I	Hadist	Lirboyo, Maunah Sari Kediri, HM Tegalarum Magetan	UII Madiun
3.	Ulil Abshor, LC	Ilmu Tafsir, Balagoh, Mantiq, Arudl, Ilmu kalam,	Denanyar Jombang	Al-Azhar University
4.	Alim Rohmatulloh, S.H	Pelajaran Umum	-	STAIM Magetan
5.	Agus Mutok, S.Pd.I	Ilmu Hadist, Nahwu, Ahlak Tasawuf	Tremas	STAINU Pacitan
6.	Moh. Hamidi	Tauhid	Tremas Pacitan	MA
7.	Nyoto, S.H	Sorof	Pesantren Takeran	STAIM Magetan

8.	Ahmad Mufid	Nahwu	Pesantren Takeran	MA
9.	Agung Hendra	Fikih	Pesantren Takeran	MA
10.	Moh. Yusuf	Tarih	Pesantren Takeran	MA
11.	Abdul Wahid A	Al-Quran, Tajwid	Pesantren Takeran	STAIM Magetan
12.	Ahmad Sidiq, S.Pd.I	Ushul Fiqih, Tauhid	Tremas Pacitan	UII Madiun
13.	M. Wahekotin	Ushul Fiqih	HM Tegal Arum	UII Madiun
14.	Fatkhur Ridwan,S.H	Nahwu Sorf	Pesantren Takeran	STAIM Magetan
15.	Imam, S.H	Tarikh	Pesantren Takeran	STAIM Magetan
16.	Moh. Irfan	Ilmu Falak	Pesantren Takeran	MA
17.	Mohammad Syukri	Ahkam As-sulthoniyyah	Pesantren Takeran	MA

Tabel 2.4 : *Tenaga pendidik Cokrokertopati,*
Sumber : Dokumen Cokrokertopati 2020

G. Peserta didik

Setelah Kiai Zuhi Tafsir bersama tokoh-tokoh masyarakat mendirikan Pesantren Cokrokertopati sebagai upaya segmentasi keagamaan dengan konsep pesantren

salafiah di lingkup Pesantren Takeran pada tahun 2009, jumlah peserta didik yang mengikuti konsep tersebut tergolong sangat sedikit. Tercatat diawal berdiri hanya 8 anak yang mendaftarkan diri di Cokrokertopati. hal tersebut menurut Gus Aan dapat dimaklumi sebab selain konsep pesantren salafiyah di lingkup Pesantren belum dikenal oleh masyarakat luas juga disebabkan segmentasi salafiyah tidak dapat diikuti seluruh peserta didik yang notabnya masih menempuh pendidikan formal yang tidak mungkin pindah haluan. Dan disisi lain peserta didik dan orang tua memang diberikan keleluasaan untuk memilih antara segment salafiyah ataupun non salafiyah. Seiring berjalannya waktu, jumlah peserta didik Cokrokertopati mengalami peningkatan, terlebih setelah Cokrokertopati memiliki Pendidikan Diniyah Formal. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, saat ini Cokrokertopati memilki 190 peserta didik yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya berasal dari kabupaten Magetan sendiri, Ponorogo, Madiun, Pacitan, Ngawi, Wonogiri, Jombang, Pacitan. dan untuk luar jawa adalah Kalimantan.

DATA PESERTA DIDIK WUSTHO						
Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Jumlah Total
L	P	L	P	L	P	91
17	14	20	15	18	16	

Tabel 2.5 : *Peserta didik Wustho Cokrokertopati 2020*

DATA PESERTA DIDIK ULYA						
Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Jumlah Total
L	P	L	P	L	P	91
20	10	15	16	17	13	

Tabel 2.6 : *Jumlah Peserta didik Ulya Cokrokertopati 2020*

Dari segi jumlah peserta didik Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati dengan persyaratan memiliki peserta didik paling sedikit 32 (tigapuluh dua orang) per rombel, maka jumlah tersebut telah memenuhi standard yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

H. Sarana dan Prasarana

Hingga saat ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah memiliki 3 gedung bertingkat yang terdiri dari 20 ruang , 6 ruang untuk kelas, 1 ruang tata usaha yang didalamnya terdapat 4 buah computer dan dua buah laptop, 1 ruang tenaga pendidik dengan konsep lesehan sekaligus

menjadi ruang perpustakaan dan 1 gudang, dan 11 ruang belum dipergunakan.²⁶ Dan diantara 4 ruang yang belum dipergunakan dapat dimanfaatkan menjadi aula ketika dibutuhkan.

Di depan madrasah terdapat tempat parkir kendaraan roda dua dan terdapat halaman yang hanya cukup untuk melaksanakan apel harian. Dikarenakan keterbatasan lahan, pelaksanaan upacara mingguan atau hari-hari besar dilaksanakan didepan masjid Jami' Takeran di depan asrama putra Cokrokertopati.



²⁶ Observasi di Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati secara periodik kemudian dipertanyakan melalui wawancara dengan Gus Aan pada 25 Oktober 2020 di kantor madrasah.

BAB III
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DINIYAH FORMAL
DI MADRASAH COKROKERTOPATI TAKERAN
MAGETAN

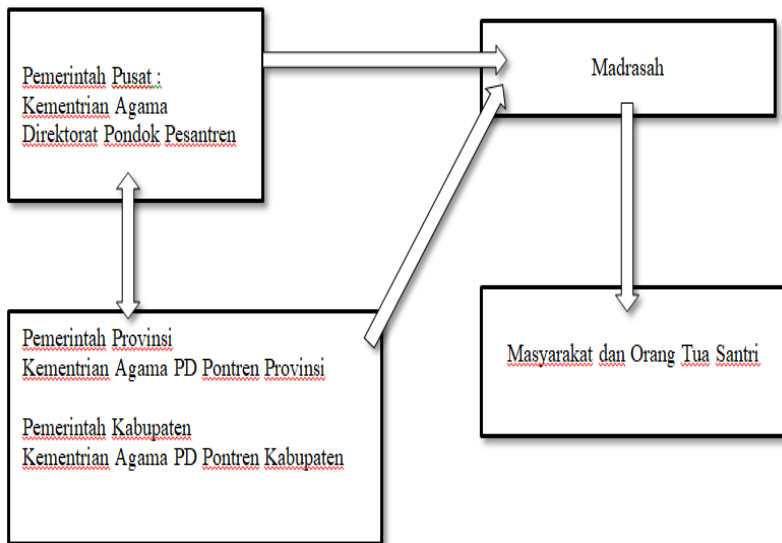
Setelah pada bab sebelumnya peneliti mendeskripsikan lembaga Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati yang berada di Takeran Magetan, maka dalam bab ini peneliti membahas dan menganalisis kritis bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dilihat dari teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Analisis pertama dimulai dari faktor komunikasi, implementasi kebijakan pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren telah berjalan. Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah, yaitu Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren dan jajaran dibawahnya termasuk sub Kementerian Agama Kabupaten Magetan sampai dengan ke madrasah. Pelaksana kebijakan Kementerian Agama Kabupaten . Sedangkan obyek yang diatur

adalah Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati di kecamatan Takeran sebagai ujung tombak implementor kebijakan.

Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur komunikasi implementasi kebijakan

Alur komunikasi diatas tentu saja menimbulkan pertanyaan apakah komunikasi antara *policy maker*, *implementor* daerah dan *implementor* madrasah dapat dikatakan telah berhasil ? Jika hal tersebut dikaitkan dengan konsep komunikasi bahwa, komunikasi disebut efektif tidak

hanya apabila informasi yang ditransmisikan oleh komunikator dapat diterima oleh pembaca dengan jelas, melainkan komunikasi disebut efektif apabila dapat menghasilkan *attitude change*, *behavior change*, *opinion change* dan *social change*.²⁷ Hal ini dikarenakan kegiatan komunikasi tidak terbatas membuat orang lain mengerti dan mengetahui, melainkan juga membuat orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, ajakan, perbuatan atau kegiatan. Sekaligus mendorong pembaca dalam hal ini implementor untuk memiliki komitmen dan bertanggung-jawab atas segala konsekuensinya. sehingga kinerja implementor senantiasa *on the right track* berjalan semestinya dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. dan supaya *mission accomplished* tercapai tujuan dan targetnya. Jeff Boss dalam majalah Forbes 2018 yang berjudul *A Simple Flow For Thinking About Organizational Alighment* mengibaratkan orang-orang dalam sebuah organisasi layaknya navi seals yaitu unit pasukan kusus, yang dituntut siap beroperasi di berbagai medan pertempuran, medan pertempuran yang terus berubah kondisi dan situasinya dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk menghadapi hal tersebut dan supaya *mission*

²⁷ Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Pustaka Setia: 2017.215.

accomplished tercapai tujuan dan targetnya maka diperlukan lima hal yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang jelas, sebuah strategi praktis, rencana prioritas dan metrik yang jelas (struktur organisasi). Dan menurut Jeff Boss terdapat satu hal yang lebih penting dari kelima hal tersebut yaitu kesadaran diri bahwa seseorang tidak dapat bekerja sendirian. Dibutuhkan keselarasan usaha dan tujuan antar unit baik internal maupun eksternal, sekaligus mengetahui strategi, rencana, prioritas dan tupoksinya. Dal hal tersebut hanya dapat dicapai dengan komunikasi yang baik.²⁸ Intinya adalah, keberhasilan implementasi tidak semata-mata berdasarkan kompetensi dan kinerja yang tinggi, namun sangat bergantung pada kemampuan komunikasi yang efektif sehingga dapat menyelaraskan tiap-tiap unit.

Sementara untuk menganalisa keefektifan komunikasi, Edward III menggunakan tiga indikator, yaitu tranmisi, kejelasan informasi dan konsistensi. Dari sisi tranmisi informasi mengenai Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal disampaikan kepada madrasah. Informasi kepada madrasah

²⁸ Jeff Boss., 2018, *Leadership Strategy (A Simple Flow For Thinking About Organizational Alighment)*, https://www.forbes.com/sites/jeffboss/2018/01/21/a_simple_flow_to_think_about_organizational_alignment/, {14 Desember 2020}, Diakses pada pukul 24.15 WIB.

sebagai ujung tombak implementor pada dasarnya sudah disampaikan dengan jelas, pola transmisi informasi yang dilakukan Pemerintah adalah melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung biasanya pada saat kegiatan sosialisasi atau workshop Pendidikan Diniyah Formal semacam pengembangan kompetensi pendidikan maupun pengembangan kurikulum yang diadakan di balai pertemuan atau kantor dinas, dimana delegasi dari madrasah diundang untuk mendengarkan dan mengetahui materi program Pendidikan Diniyah Formal ataupun pada saat madrasah menyerahkan laporan pertanggung jawaban administratif. Secara tidak langsung biasanya melalui telepon dan surat edaran.

Ketua yayasan perguruan Islam Cokrokertopati mengemukakan:²⁹

Setiap tahun paling ndak satu sampai empat lima kalian kemenag mengadakan worksop sosialisasi Pendidikan Diniyah Formal dengan PDF seluruh Indonesia atau jawa timur , kalau memang masalahnya penting ya biasanya melalui surat edaran, kalau ndak gitu ya telepon.

²⁹ Wawancara dengan Gus Aan di kantor madrasah pada 25 Oktober 2020.

Namun yang menjadi persoalan dan menjadi keresahan madrasah adalah persoalan transmisi informasi pemerintah berkenaan Pendidikan Diniyah Formal hanya terfokus kepada implementor kelembagaan saja tanpa menghiraukan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan dan objek kebijakan. Meskipun dapat dijumpai melalui jelajah internet bahwa pemerintah telah mensosialisasikan program itu di website masing-masing atau kolom berita nasional, namun tanpa adanya pendampingan sosialisasi secara langsung dikawatirkan informasi mengenai Pendidikan Diniyah Formal tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga berakibat ketidak-fahaman dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Dimana masyarakat masih menganggap Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopai adalah Pendidikan Diniyah milik pesantren salafiyah yang dilaksanakan pada waktu sore hari, sehingga santri-santrinya bebas untuk memilih sekolah pada waktu pagi harinya. Dan masyarakat juga menganggap Pendidikan Diniyah Formal merupakan pesantren yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) yang selama ini memang menjadi solusi dan alternatif bagi pesantren yang ingin tetap mempertahankan kajian keagamaannya. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar mengenai

standar kelembagaan maupun kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana legalitas ijasahnya.

Sementara dari sisi kejelasan informasi, penyampaian informasi oleh *policy maker* dalam hal ini adalah pemerintah kepada lembaga pada dasarnya telah disampaikan secara jelas. Kejelasan tersebut diperoleh dari melalui penjelasan dalam rapat kordinasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi pada tiap tahunnya. Lembaga dapat mengajukan pertanyaan apabila terdapat ketidak-jelasan informasi. seperti yang telah dikemukakan oleh kepala madrasah Cokrokertopati :³⁰

Alhamdulillah kita juga banyak dibantu oleh para kyai yang menjadi pioneer Pendidikan Diniyah Formal, ya Gus lukman Tremas, Gus Reza Lirboyo, ketika ada persoalan biasanya kita biasanya sowan untuk bertanya langsung kepada beliau-beliau, biasanya ketua yayasan Gus Aan yang menghubungi beliau-beliau ini.

Dan untuk persoalan yang bersifat administratif madrasah dapat bertanya langsung kepada bagian Kementrian Agama PD Pontren kabupaten Magetan. Namun demikian dari sisi konsistensi, penerimaan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal

³⁰ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 25 Oktober 2020.

masih sangat bergantung kepada informasi yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi, ditambah dengan intensitas pertemuan yang tergolong minim. Hal-hal semacam petunjuk administrasi santri, visitasi, akreditasi dan pelaksanaan ujian nasional madrasah beranggapan bahwa hal-hal itu dengan sepengetahuan implementor di atas madrasah dalam hal ini Kementerian Agama PD Pontren kabupaten Magetan. Namun dalam beberapa kasus ternyata tanpa sepengetahuan pihak Kementerian Agama PD Pontren kabupaten Magetan.³¹ selain itu penerimaan informasi juga sangat bergantung kepada informasi yang diperoleh dari komunitas pesantren penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal melalui grup whats up. Hal tersebut membuat komunikasi menjadi bersifat satu arah saja. Dimana Cokrokertopati sebagai ujung tombak implementor bersikap pasif dan kesulitan untuk melakukan *feedback* dan meluapkan aspirasinya terutama kepada Kementerian Agama PD Pontren kabupaten Magetan. Sehingga tidak adanya *feedback* dan kurangnya kordinasi dikawatirkan membuat *policy maker* kesulitan atau bahkan tidak tahu, apakah kebijakan yang diterapkan sudah berhasil dan

³¹ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Oktober 2020.

bagaimanakah realita dilapangan dan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh madrasah Cokrokertopati dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kebijakan tersebut, bagaimana solusinya.

Komunikasi-komunikasi yang terjadi di atas apabila dikaitkan dengan sudut pandang Jeff Boss juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana sesungguhnya perumusan dan perencanaan program kebijakan pendidikan itu, bagaimana tupoksi tiap unit implementornya, bagaimana strateginya dan siapa sasaran kebijakan itu. terlebih kebijakan itu dalam hal kebijakan Pendidikan Diniyah Formal merupakan program *pilot project*, yaitu program kebijakan yang didesain untuk percontohan dan pengujian *project* yang lebih besar dalam rangka melihat efektifitas, nilai ekonomis dan dampak dari kebijakan itu.³² sehingga program itu diperlukan kendali komunikasi yang intensif. Tanpa adanya komunikasi yang intensif maka program *pilot project* itu akan menjadi program *auto pilot*, dimana tiap-tiap unit implementor dianggap telah mampu melaksanakan program-program kebijakan itu sepenuhnya secara otomatis.

³² Catur Setiawan, Esti Septina Emirsa, Analisis Kebijakan Terkait Prioritas Pilot Project Implementasi Sistem Informasi Menggunakan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Pekommas, Vol. 17 No. 3, Desember 2014: 129 – 138.

B. Sumber Daya

Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka roda organisasi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak akan berjalan optimal. Menurut Edward III keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, dan tanpa kecukupan sumber daya maka output kebijakan tidak akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut Edward III terdiri dari staf, informasi, wewenang, fasilitas dan finansial.

1. Staf

Pembahasan dalam sumber daya staf ini oleh peneliti lebih diarahkan kepada staf pemerintah kabupaten dan staf kelembagaan Cokrokertopati dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, dan lebih banyak menggunakan perspektif Cokrokertopati. Sedangkan perangkat uji untuk menganalisa sumber daya staf adalah *size* dan *skill*. Edward III menegaskan bahwa:

we must evaluate the bureaucracy, not only in term absolute numbers, bu also in term of it is capabilities to perform desired task.

Berdasarkan pernyataan Edward III itu dapat disimpulkan pembahasan mengenai staf tidak terbatas pada

persoalan *size* saja. Akan tetapi keberhasilan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor skill staf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pendidikan dan pondok pesantren kabupaten Magetan diperoleh hasil bahwa staf yang terlibat dalam program pendidikan diniyah formal berjumlah 5 (lima) orang tenaga ahli.³³ Kendati demikian sesuai SK kelima orang tersebut tidak hanya bergerak dalam pendidikan diniyah formal saja melainkan membawahi madrasah, pendidikan diniyah dan pesantren secara umum di Magetan. Hal itu selain dikarenakan memang belum ada unit tersendiri yang mengelola Pendidikan Diniyah Formal, akan tetapi juga karena jumlah pendidikan diniyah formal di takeran hanya berjumlah satu lembaga sehingga dirasa belum membutuhkan tambahan unit khusus yang mengurus Pendidikan Diniyah Formal. Dan dari kelima orang tersebut yang terlibat langsung dengan Cokrokertopati adalah kepala seksi bidang pendidikan diniyah formal dan pondok pesantren kabupaten Magetan bapak Yusron Kholid dan bapak Arif sebagai administrator pengelola data kemadrasahan dan kepesantrenan.³⁴ Hal itu apabila dilihat dari

³³ Wawancara dengan bapak Yusron Kholid kasi PD Pontren Magetan pada 11 November 2020.

³⁴ Wawancara dengan bapak Yusron Kholid kasi PD Pontren Magetan pada 11 November 2020.

segi *size* maka dapat dikatakan staf di lingkup bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren kabupaten Magetan belum memiliki staf yang memadai, meskipun dilihat dari segi jumlah pihak penyelenggara Pendidikan Formal hanya satu lembaga di Magetan. Hal itu diperkuat tidak adanya pembinaan dan pengawasan secara khusus untuk madrasah Cokrokertopati yang menyelenggarakan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal yang kemungkinan besar memang disebabkan sumber daya staf yang kurang memadai dari segi *size*. sehingga staf-staf itu meskipun memiliki memadai dari segi *skill*, namun staf itu tidak didayagunakan untuk pembinaan dan pengawasan madrasah Cokrokertopati. sebab mereka lebih banyak didayagunakan untuk keperluan-keperluan administrative semata.

Sementara sumber daya staf yang terdapat di Cokrokertopati dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dari segi *size*, dengan menimbang Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6036 tahun 2015, dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6963 tahun 2017 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha dan Ulya yang menentukan bahwa beban belajar tatap muka perminggu adalah 52 jam pelajaran dengan durasi 40 menit tiap jamnya

dengan muatan 70 persen kelompok pelajaran keagamaan dan 30 persen pelajaran pendidikan umum. dan dengan menimbang jumlah kelas sebanyak 6 kelas yang terdiri dari 3 kelas wustho dan 3 kelas ulya. Tercatat Cokrokertopati hanya memiliki 17 tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas mengajar di madrasah sekaligus di pesantren dan ma'had ali nya yang begitu padat. Berdasarkan hal itu dari sisi *size*, madrasah Cokrokertopati belum memiliki staf yang memadai.³⁵

Sementara dari sisi *skill* yang terdapat di madrasah Cokrokertopati, dari 17 tenaga pendidik yang terdapat di Cokrokertopati 16 orang tenaga pendidik berlatar pesantren salafiyah dan telah memenuhi kualifikasi untuk mengampu berbagai macam kajian keagamaan atau kitab kuning. Namun demikian, terdapat tenaga pendidik yang yang tidak atau belum memiliki ijazah S1 sehingga dapat dikatakan belum memenuhi standar kualifikasi akademik untuk tenaga pendidik dan kependidikan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 31 tentang pendidik dan tenaga kependidikan. dan Cokrokertopati hanya memiliki satu tenaga pendidik yang mengampu muatan pendidikan

³⁵ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 25 Oktober 2020.

umum untuk wustho sekaligus ulya.³⁶ Berdasarkan hal itu sebenarnya Cokrokertoati memiliki skill tenaga pendidik yang memadai meskipun terkendala kualifikasi akademik. Namun demikian belum memiliki size tenaga pendidik yang memadai untuk mengcover seluruh kegiatan belajar mengajar di madrasah, pesantren maupun ma'had lainnya. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagaimana efektifitas belajar mengajar di madrasah Cokrokertoati. sementara disisi lain tenaga pendidik mendapatkan tugas-tugas lain selain mengajar diwaktu yang sama. Berdasarkan pengamatan dijumpai beberapa kelas kosong di jam mata pelajaran tertentu, dimana hal itu disebabkan tenaga pendidikan memiliki tugas lain selain mengajar yang harus dilaksanakan.³⁷ Artinya kurangnya *size* tenaga pendidik di Cokrokertoati merupakan persoalan yang seharusnya dapat diatasi oleh pihak pengelola madrasah.

2. Informasi

Dua hal penting untuk dibahas berkaitan dengan informasi sebagai hal yang memiliki pengaruh terhadap sumber daya. *Pertama*, informasi yang berkaitan dengan bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, Informasi yang berkaitan

³⁶ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 25 Oktober 2020.

³⁷ Observasi pada pada Oktober 2020 - Januari 2020.

dengan aturan dan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan kebijakan. Secara umum informasi terkait kebijakan Pendidikan Diniyah Formal untuk pesantren telah disampaikan oleh *policy maker* kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan itu, mulai dari pihak-pihak implementor (Implementor pemerintah dan madrasah) hingga objek kebijakan secara berjenjang. dimana terjadi empat tahap alur komunikasi. Informasi telah disampaikan berdasarkan peraturan yang berlaku, baik peraturan daerah tentang pedoman dan regulasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal Nomor 2 dan 14 tahun 2018, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 Pendidikan Diniyah Formal disertai dengan Juklak/Juknis tahun 2014 berupa buku panduan yang didistribusikan keseluruh pesantren yang mendapatkan program *pilot project*.³⁸

Media yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menyampaikan informasi adalah melalui rapat dan sosialisasi dengan seluruh pimpinan Pendidikan Diniyah Formal dan wakilnya secara periodik dan dilengkapi dengan surat edaran. bahkan sampai dengan media komunikasi telepon seluler. Namun sejak terjadi pandemik Covid 19 pada tahun

³⁸ Wawancara dengan Gus Aan di gazebo Cokrokertopati pada 25 Oktober 2020.

2020 sosialisasi dan rapat hanya dilakukan melalui aplikasi *zoom*. Sementara untuk tingkat Kabupaten belum pernah diadakan rapat ataupun sosialisasi sama sekali. dan sosialisasi ditingkat madrasah ataupun masyarakat belum ada pendampingan dari pemerintah kabupaten. Sementara sosialisasi kepada masyarakat adalah melalui pengajian-pengajian yang diadakan oleh Cokrokertopati diberbagai wilayah di Takeran dengan mendatangkan tokoh-tokoh Pendidikan Diniyah Formal sebagai muballig sekaligus pensosialisasi progam yang tergolong baru itu.

Untuk menghindari pengulangan pembahasan, dalam pada sub bab ini penulis hanya menjelaskan secara umum, karena pada pembahasan sebelumnya yaitu komunikasi telah mencakup pembahasan tentang informasi.

3. Wewenang

Wewenang memiliki makna hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab pekerjaan kepada orang lain. Dan kebijakan tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai pendelegasian wewenang kepada implementor Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal memiliki struktur pelaksanaan bertingkat. Artinya terdapat kordinasi antar instansi terkait, baik kordinasi hubungan pertanggung jawaban

secara vertikal maupun secara horizontal. Meskipun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab komunikasi bahwa kordinasi antara Cokrokertopati dengan Kementrian agama lebih banyak berkutat pada persoalan administrasi semisal izin lembaga atau pelaporan data peserta didik dan santri, namun demikian itu sudah merupakan indikasi adanya pendelegasian wewenang. Pada tahap pemantauan kewenangan berada di Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Pusat, Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Provinsi Jawa Timur dan Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren kabupaten.

Setiap tahap kegiatan Pendidikan Diniyah Formal yang dilakukan di Cokrokertopati adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Pada tahap perencanaan, wewenang diberikan kepada Pusat (Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren).
- b. Pada tahap pelaksanaan, wewenang pertama diberikan kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Jawa Timur. Dan wewenang dan tanggung-jawabnya sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan dan melakukan sosialisasi program Pendidikan Diniyah Formal di tingkat provinsi.

³⁹ Wawancara dengan bapak Yusron Kholid kasi PD Pontren Magetan pada 11 November 2020.

- 2) Mempersiapkan dan melatih manajemen Kabupaten.
- 3) Berkoordinasi dengan Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren kabupaten.

Untuk wewenang kedua diberikan kepada Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren kabupaten Magetan. adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan madrasah.
- 2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kepala madrasah.
- 3) Melakukan koordinasi dengan tata usaha madrasah dalam pendataan santri dan peserta didik.
- 4) Melakukan visitasi madrasah dalam rangka membantu proses akreditasi.
- 5) Memberikan pelayanan dan penanganan madrasah
- 6) Melaporkan pelaksanaan program kepada Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama wilayah Jawa-Timur.

Dan untuk wewenang ketiga diberikan kepada madrasah Cokrokertopati. adapun tugas dan tanggung-jawabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan progam Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan regulasi dan pedoman penyelenggaraan diniyah formal yang telah ditetapkan.

- 2) Melaksanakan sistem pengendalian mutu.
- 3) Melaporkan pelaksanaan progam Pendidikan Diniyah Formal kepada Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kabupaten.

Kendati data-data di atas telah menunjukkan tupoksi dan wewenang masing-masing *policy maker* dan implementor, namun demikian apabila dilihat dari siapa yang berwenang dan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati maka terdapat ketidak-sesuaian. Sebab selama ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah pemerintah provinsi Jawa Timur secara langsung, meskipun dengan intensitas pertemuan yang tergolong minim. Dan yang menjadi persoalan apakah kegiatan-kegiatan tersebut dengan sepengetahuan pemerintah kabupaten dan bagaimana tupoksi pemerintah kabupaten sebenarnya. selain itu selama ini kegiatan inspeksi atau visitasi secara rutin tiap tahun dilakukan oleh pemerintah provinsi.⁴⁰ Artinya adanya inspeksi atau visitasi tersebut menuntut pengawasan dan pembinaan kepada madrasah Cokrokertopati sebelumnya, sebelum kegiatan visitasi itu dilaksanakan.

⁴⁰ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 11 November 2020.

Disisi lain madrasah Cokrokertopati hendaknya dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal. Tidak hanya dapat melaporkan kegiatan administratif semata. Lebih dari itu madrasah Cokrokertopati hendaknya dapat melaporkan penyelenggaraan kegiatan pendidikannya sesuai regulasi, dan dapat melaksanakan pengendalian mutu kepada pemerintah kabupaten. Apabila tidak, maka apa yang hendak dilaporkan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi terkait imlementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di wilayah pengawasannya.

4. Fasilitas

Berdasarkan hasil observasi ke Madrasah Cokrokertopati diperoleh informasi bahwa madrasah Cokrokertopati belum memiliki ketersediaan fasilitas dalam mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal sepenuhnya sesuai pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal dengan 8 ketentuan standar sarana dan prasarana yaitu luas lahan, gedung, ruang kelas,koleksi kitab/bahan ajar, media pembelajaran dan peralatan penunjang administrasi.⁴¹ Kendati demikian persyaratan teknis itu mendapatkan izin pengecualian dari direktur jenderal pendidikan islam. Selain itu dikarenakan

⁴¹ Observasi pada pada Oktober 2020 - Januari 2020.

ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 pasal 1 adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren, maka apabila dikaitkan dengan kepesantrenannya dapat dikatakan sudah terpenuhi standarnya, semisal keharusan memiliki tempat ibadah atau lapangan olahraga, memang madrasah tidak memilikinya namun pesantren sudah mengcover kekurangan-kekurangan itu karena memang berada di lingkungan pesantren.

Sebenarnya Cokrokertopati telah memiliki gedung yang cukup memadai. Kendati demikian ruang yang dimanfaatkan hanyalah 11 ruang dari 20 ruang. hal tersebut setelah dikonfirmasi oleh Gus Aan ternyata memang sengaja diatur sedemikian rupa, ruang guru, ruang kepala madrasah dan perpustakaan dijadikan satu ruangan dengan alasan memaksimalkan ruangan, mempermudah komunikasi dan kordinasi dan meminimalisasi kesenjangan.⁴² kendati demikian ketika ada jadwal visitasi, maka ruang-ruang kosong dimanfaatkan sebagaimana ketentuan-ketentuan standar sarana-

⁴² Wawancara dengan Gus Aan di gazebo Cokrokertopati pad 25 Oktober 2020.

sarana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁴³ Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan bagaimana profesionalisme madrasah Cokrokertopati dalam menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai ketentuan yang berlaku terkait standar sarana dan prasarana. Apakah pemenuhan sarana dan prasarana hanya untuk persoalan pelaporan semata. Sementara pasal 35 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 disebutkan bahwa madrasah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan dan ruang laboratorium.

5. Finansial

Sumber daya finansial merupakan hal penting dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Sumber daya finansial merupakan kecukupan modal investasi yang dapat menjamin keberlangsungan pelaksanaan sebuah program ataupun kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak akan dapat berjalan efektif dan optimal dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Aan diperoleh informasi bahwa cokrokertopati memiliki

⁴³ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 11 November 2020.

ketersediaan sumber daya finansial dalam mengimplementasikan program kebijakan pendidikan Diniyah formal. Gus Aan mengemukakan “*cukup yo cukup, kurang yo cukup*”⁴⁴ hal ini dikarenakan berbagai pihak ikut berpartisipasi dalam dukungan finansial di Cokrokertopati sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak, diantaranya pemerintah, masyarakat dan keluarga peserta didik untuk memperlancar kegiatan Pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam hal ini pemerintah sebagai sumber dana telah menginvestasikan sebagian dananya ke dalam pendidikan dipesantren melalui BOS pesantren atau pendidikan diniyah formal. Dana yang berasal dari pemerintah itu dimanfaatkan oleh Cokrokertopati untuk operasional madrasah sesuai petunjuk teknis pengelolaan Bos pesantren dan pendidikan Diniyah formal yang telah diterbitkan oleh direktorat pendidikan diniyah dan pondok pesantren tahun 2019.

Adapun komponen pembiayaan dalam petunjuk teknis BOS tersebut ada 14, yaitu pengembangan perpustakaan,

⁴⁴ Wawancara dengan Gus Aan di gazebo Cokrokertopati pad 25 Oktober 2020.

kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan pondok pesantren, pembayaran honorarium bulanan guru/ustaz honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer pembelian peralatan ibadah dan biaya lainnya jika seluruh komponen satu sampai dengan 13 telah terpenuhi sesuai kebutuhan pendanaan dari dana BOS. berdasarkan 14 komponen diatas, Cokrokertopati sebenarnya lebih banyak memanfaatkan dana dari pemerintah sebesar 23.000.000 rupiah untuk honorarium guru, pembelian bahan-bahan habis pakai dan sisanya untuk memenuhi komponen lain secara bergantian.⁴⁵

Kendati dana BOS itu dirasa kurang dan dikarenakan faktor keterlambatan pencairan dana itu, Cokrokertohti tidak dapat menggantungkan biaya pengelolaan madrasah kepada BOS saja. Sedari awal Cokrokertopati merupakan lembaga pendidikan yang bernaung dibawah yayasan perguruan Islam

⁴⁵ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 11 November 2020.

Cokrokertopati. Yayasan perguruan Islam Cokrokertopati atau biasa disebut YPI Cokrokertopati ini merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan, sosial, spiritual dan keagamaan yang memperoleh dana dari partisipasi dan swadaya masyarakat. Dana yang diperoleh dari masyarakat itu dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan seluruh kegiatan kemadrasahan ataupun kepesantrenan. Meskipun sebenarnya dana tersebut lebih banyak digunakan untuk mengcover biaya peserta didik yang tidak mampu. Sebab memang sebagian peserta didik Cokrokertopati berasal dari keluarga menengah kebawah yang membutuhkan keringanan biaya bulanan atau bahkan gratis. Hal itu juga yang mendorong Cokrokertopati mengambil kebijakan untuk biaya infaq bulanan madrasah sekaligus pesantren sebesar 220.000 ribu rupiah yang tergolong sangat murah untuk saat ini, sehingga perolehan dana dari YPI Cokrokertopati mau tidak mau lebih banyak digunakan untuk peserta didik yang tidak mampu.

Di sisi lain hal di atas menimbulkan persoalan baru terkait gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. sebab pada prakteknya dana untuk gaji hanya cukup untuk diberikan kepada tenaga pendidik yang tidak bertempat tinggal di pesantren. sementara tenaga pendidik yang bertempat tinggal di pesantren yang notabnya memang dianggap tenaga

pengabdian hanya mendapatkan uang yang tidak tentu dari Kiai Zuhi secara langsung. Sehingga hal itu menimbulkan rasa tidak enak, semacam ada jarak antara tenaga pendidik yang bertempat tinggal di pesantren dan yang diluar pesantren. seperti yang dikemukakan ustadz Ulin Nuha:⁴⁶

Sebenarnya kita-kita yang non mukim ini sungkan dengan yang mukim, ketika pembagian gaji kita riku (sungkan) didepan ustadz mukim, sebab yang dapat gaji kan hanya kita, saya sebagai kepala kadang juga sungkan menyuruh-nyuruh, karena memang mereka tidak memperoleh gaji.

Berdasarkan pengakuan ustadz Ulin Nuha itu maka diperoleh hasil persoalan pembiayaan terutama untuk gaji tenaga pendidik dapat dikatakan kurang memadai. Apakah tenaga pendidik itu dalam masa pengabdian ataukah tidak sudah seharusnya madrasah dapat memberikan gaji sepantasnya. Jika tidak maka kan terjadi kesenjangan-kesenjangan antara satu tenaga pendidik dengan tenaga pendidik lainnya dan dalam rangka memotivasi kinerja tenaga pendidik melalui pemberian gaji itu.

Menurut hemat peneliti hal itu dapat diminamisir melalui pembayaran iuran dengan dua pintu, madrasah

⁴⁶ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 3 Januari 2021.

diberikan kewenangan sendiri untuk memungut biaya dari peserta didik. Sehingga dana itu paling tidak dapat digunakan madrasah untuk memberi gaji tenaga pendidik yang bertempat di pesantren atau kebutuhan-kebutuhan madrasah lainnya.

C. Disposisi

Faktor disposisi implementor oleh Edward III juga dianggap sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Disposisi mengandung makna sikap dan perspektif pada tataran implementor terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dari sebuah kebijakan. Dan indikasi terdapatnya disposisi dalam tataran implementor diantaranya sikap atau perilaku negatif seperti sikap keengganan, parokialisme atau memandang dunia berdasarkan perspektif pribadi atau nilai-nilai pribadi yang dianutnya sehingga tidak mengakui atau menghargai perspektif orang lain, selektif terhadap aspek-aspek kebijakan yang dianggap menguntungkan disisi lain melalaikan aspek-aspek kebijakan yang dianggap tidak kongruen atau sejalan dengan kepentingan organisasi implementor asalnya.

Perbedaan disposisi pada tiap-tiap implementor dapat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dari berbagai aspek

misalnya aspek sosial budaya, sosial ekonomi, geografis, besar dan kecilnya sasaran implementasi kebijakan dan status institusi negeri atau swasta implementor yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Aan diperoleh hasil bahwa sebenarnya Cokrokertopati memiliki komitmen untuk melaksanakan program kebijakan Pendidikan Diniyah Formal sepenuhnya. Kendati demikian karakteristik pesantren tidak dapat diabaikan begitu saja sesuai dengan keinginan Kyai Zuhdi Tafsir sebagai pengasuh kepesantrenan.

Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan tujuannya adalah mencetak kader-kader yang ahli agama. Namun sesuai dengan keinginan Kiai Zuhdi Tafsir dan hal ini telah dikonfirmasi oleh beliau melalui wawancara dengan penulis bahwa sebenarnya Cokrokertopati lebih mengutamakan pendidikan keagamaan yang bersifat praktis, yaitu peserta didik lebih banyak ditekankan untuk dapat menguasai praktek-praktek keagamaan aplikatif dan dapat terasa manfaatnya bagi masyarakat secara langsung seperti mampu menjadi imam shalat, pemimpin tahlil. Mengutip kata-kata Kiai Zuhdi Tafsir .⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 10 Oktober 2020.

Santri ki sing penting iso ngaji, dadi imam, iso dadi imam tahlil, dene pinter ngaji kitab ki leg gunane ge bahsul masail tok ae tho” (Santri itu yang penting mampu mengaji, mampu menjadi imam, sedangkan pandai dalam kitab kuning kan hanya dapat digunakan untuk bahsul masail saja).

Artinya tidak seluruh peserta didik dituntut untuk menguasai kajian-kajian kitab kuning akan tetapi hanya bagi peserta didik yang memiliki kompetensi dalam bidang itu saja. Namun seluruh santri wajib menguasai praktik keagamaan yang bersifat praktis itu. selain praktik keagamaan yang bersifat praktis, aspek spiritual merupakan suatu hal yang tidak boleh hilang dari Cokrokertopati sebagai bagian pesantren Takeran yang berlatar belakang tasawuf. Selain praktek keagamaan yang bersifat praktis dan spiritual, aspek kemasyarakatan merupakan karakteristik Cokrokertopati yang begitu melekat, mulai dari berbaur, bergaul, membantu dan memenuhi undangan dalam berbagai bidang yang digagas oleh masyarakat, seperti undangan tahlilan, bersih desa, membantu bongkar dan mendirikan rumah dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Mengutip kata-kata Kiai Zuhdi Tafsir :

“Santri kui diajari sosiologi, makane neng kene santri kudu iso berbaur karo masyarakat” (Santri itu diajari

sosiologi, jadi santri disini harus dapat berbaur dengan masyarakat).

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 telah diatur bahwa pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal secara teknis menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal. Hal ini memperjelas bahwa konsep manajerial pendidikan diniyah formal dan pesantren sesungguhnya berbeda.⁴⁸ Meskipun memang Pendidikan Diniyah Formal tumbuh dan berkembang dan harus berada dalam lingkungan pesantren, namun secara teknis tidak berada dibawah otoritas kiyai sebagai pimpinan pesantren dalam hal manajemennya. Artinya persepsi-persepsi implementor Cokrokertopati apabila dikaitkan dengan peraturan itu dapat dikatakan terdapat disposisi. Sebab memang di Cokrokertopati yang memiliki otoritas penuh adalah Kiai Zuhdi Tafsir selaku pengasuh pesantren yang menjaga karakteristik pesantren Takeran.

Selain persepsi-persepsi yang telah disebutkan di atas, terdapat satu persepsi yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir bahwa Cokrokertopati

⁴⁸ Ratna Dewi, Jetri Limbong , *Manajemen Pendidikan Diniyah Formal*, MADRAS: Journal of Islamic Educational Management Journal VOL.1, 2018, 023-029

komitmen untuk menerima seluruh dan segala macam peserta didik beserta latar belakang pendidikan maupun keluarganya.

Kiai Zuhdi Tafsir mengemukakan :⁴⁹

Umate nabi Muhammad iki yo macem-macem, ono sing sugih yo ono sing mlarat, modele yo bedo-bedo, yo ono sing pinter yo ono sing bodo, yo iki tugase awake dewe ngramut (Umatnya Nabi Muhammad ini bermacam-macam, terdapat yang kaya terdapat pula yang miskin, modelnya pun bermacam-macam, terdapat yang pintar terdapat pula yang miskin, ya inilah tugas kita merawat.

Persepsi itu menjadi prinsip yang dipegang oleh Cokrokertopati dan menjadi keunikan tersendiri, namun demikian, dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 pasal 33 yang mengatur bahwa satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat menetapkan standar minimal kompetensi calon peserta didik. dan hal ini memperjelas bahwa lembaga perlu memperhatikan standar kompetensi input peserta didik dengan harapan dapat menjaga kualitas output peserta didik dan mutu Pendidikan Diniyah Formal. Artinya persepsi itu apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri maka dapat dikatakan terdapat disposisi, sebab Cokrokertopati tidak dapat menentukan standar minimal kompetensi calon peserta didik, dan mau tidak mau Cokrokertopati harus menerima

⁴⁹ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 10 Oktober 2020.

konsekuensi yang telah diambil dari prinsip itu, meskipun disisi lain juga menambah persoalan baru di madrasah,. Terdapat peserta didik yang menurut Gus Aan:

*Neng SLB kepinteren, Sekolah kengisoren (di Sekolah Luar Biasa terlalu pintar dan disekolah biasa terlalu bodoh).*⁵⁰ .

Kondisi diatas menyulitkan madrasah dalam penilaian dalam kenaikan kelas. Indikator apa yang hendak diambil untuk layak naik kelas, apakah kemampuan materi pelajaran ataukah indikator yang lainnya. Sehingga di ambil kebijakan madrasah tahun ini naik kelas dan tahun berikutnya tidak naik kelas dan seterusnya untuk peserta didik golongan itu. selain itu terdapat peserta didik yang di daftarkan ke pesantren dalam rangka pembinaan akhlak atau motif spiritual keagamaan “Ngalaf Barokahe Kiai Hasan Ulama yang telah menempuh jenjang pendidikan SMP ataupun SMA. Sehingga peserta didik itu kesulitan memahami kajian-kajian kitab kuning dan membutuhkan perlakuan kusus atau kelas tambahan.

⁵⁰ Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 3 Januari 2021.

D. Struktur Birokrasi

Menurut perspektif Edward III , struktur birokrasi merupakan persoalan penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan disamping komunikasi, sumber daya dan disposisi. Struktur birokrasi merupakan lambang tugas-tugas operasi yang dicapai melalui ketentuan, aturan-aturan, spesialisasi dan wewenang. Dan tugas-tugas itu dibagi kedalam unit-fungsional, wewenang terpusat dan pengambilan keputusan berdasarkan rantai komando.

Struktur birokrasi atau organisasi dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting dalam implementasi. Salah satu aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja standar atau disingkat SOP (*Standard Operating Procedures*). Prosedur ini berfungsi sebagai *guideline* untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum yang digunakan dalam organisasi-organisasi publik ataupun swasta.⁵¹ Dengan penggunaan SOP, Implementor dapat memaksimalkan waktu yang telah tersedia. Selain itu, SOP juga berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dari unit-unit organisasi atau individu-individu dalam organisasi-organisasi yang sangat kompleks dan tersebar luas,

⁵¹ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gaya Media Terbit,2017). 26.

sehingga menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan.

Secara resmi PD Pontren Provinsi Jawa Timur, Sub PD Pontren Kabupaten Magetan dan Cokrokertopati dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal mengacu pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2014 tentang pendidikan agama Islam yang juga mengatur regulasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan Peraturan menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Penjabaran kedua Peraturan menteri itu tertuang dalam dua buku panduan yaitu regulasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan pedoman pendirian pendidikan diniyah formal. Kedua buku itu telah dimiliki oleh Kementerian Agama kabupaten dan madrasah Cokrokertopati sebagai SOP dalam menjalankan tugasnya dalam implementasi program kebijakan Pendidikan Diniyah Formal. Ketersediaan pedoman pada masing-masing unit menjadi indikasi terdapatnya SOP dalam tataran implementor. Hal itu juga didukung adanya dokumen pelaporan secara periodik penyelenggaraan program Pendidikan Diniyah Formal baik di madrasah Cokrokertopati maupun di pihak Kementerian Agama Kabupaten Magetan. artinya diatas kertas, Kementerian Agama pusat, Kementerian Agama daerah, Kementerian Agama

kabupaten dan madrasah Cokrokertopati telah bersinergi sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana akuntabilitas pelaporan penyelenggaraan program itu dan bagaimana penerapan SOP nya. lagi-lagi dikarenakan kurangnya pengawasan, pembinaan dan monitoring. Hal ini dikawatirkan dokumen pelaporan tidak sesuai dengan realita dilapangan. Selain itu menurut Edward III SOP tidak sebatas persoalan panduan ataupun pedoman semata. Namun lebih dari itu SOP harus terdiri dari pemanfaatan waktu yang tersedia dengan adanya jadwal-jadwal kinerja secara periodik, baik kinerja pengawasan, pembinaan maupun monitoring.

Aspek kedua dalam struktur birokrasi yang sangat penting adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan tersebarnya tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ke dalam unit-unit organisasi dalam satu kendali. Hal ini bertujuan mempermudah pelaksanaan kebijakan sehingga dengan demikian kebijakan dapat dilaksanakan oleh setiap unit dengan tetap pada kendali yang sama dan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Kendati dalam struktur birokrasi ditemukan tugas,wewenang dan SOP pada masing-masing unit, namun demikian seperti yang telah dijelaskan pada sub bab

sebelumnya Cokrokertapati pada prakteknya kebingungan siapakah yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, pembinaan, penanganan dan sosialisasi madrasah, apakah madrasah itu sendiri yang harus bergerak aktif, ataukah pemerintah kabupaten yang harus bergerak vertikal dan horizontal, ataukah pemerintah pusat dan provinsi yang harus bergerak vertikal. Sehingga dalam beberapa kasus Cokrokertapati melakukan tindakan tanpa pro aktif pemerintah Kabupaten seperti pelaksanaan ujian nasional pendidikan diniyah formal pada tahun 2018 dan 2019, Pelaksanaan ujian nasional pada tahun itu langsung dipimpin dan diawasi oleh tim pemerintah pusat tanpa sepengetahuan pemerintah kabupaten. Ustad Ulin Nuha mengemukakan :

Untuk pelaksanaan UN di tahun-tahun sebelumnya kita menjemput satu orang dari pusat pembawa naskah ujian sekaligus pengawas ujian.

Kondisi semacam itu menimbulkan pertanyaan bagaimana kredibilitas ujian nasional itu yang terkesan belum terstruktur dalam pelaksanaannya dan siapakah yang sebenarnya bertugas mengurus ujian nasional itu. Kendati demikian pelaksanaan ujian nasional pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan awal maret tahun 2021 pemerintah kabupaten sudah pro aktif dalam mengurus dan mengawasi

pelaksanaan ujian nasional pendidikan diniyah formal bersama pemerintah provinsi Jawa Timur. Artinya pada awal-awal pendidikan diniyah formal terdapat kesulitan dalam kordinasi antar unit dan terdapat disfungsi pertanggung jawaban. Hal itu apabila diasumsikan sebagai ketidak jelasan maka kemungkinan disebabkan oleh progam kebijakan yang tidak familiar yang masih membutuhkan proses panjang menuju kesempurnaan.

Selain persoalan ujian nasional, secara umum madrasah Cokrokertopati kesulitan untuk mengutarakan aspirasinya kepada pemerintah kabupaten untuk menangani persoalan-persoalan yang terdapat di Cokrokertopati, sebab Cokrokertopati beranggapan bahwa pemerintah kabupaten yang memiliki wewenang dan tanggung-jawab. Anggapan seperti itu dilatar belakangi oleh informasi yang diterima madrasah Cokrokertopati dari madrasah lain yang menyelenggarakan pendidikan diniyah formal melalui ASPENDIF (asosiasi pendidikan diniyah formal) bahwa di beberapa daerah seperti di Madura, Situbondo dan beberapa daerah lainnya pemerintah daerah pro aktif dalam menangani pendidikan diniyah formal,⁵² tidak hanya dalam persoalan

⁵² Wawancara dengan Ustadz Ulin Nuha di Kantor Madrasah pada 3 Januari 2021.

administrasi atau pengurusan EMIS peserta didik saja melainkan keseluruhan terkait pelaksanaan program Pendidikan Diniyah Formal.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas mengindikasikan adanya fragmentasi, meskipun fragmentasi sendiri bertujuan untuk mengendalikan dan menertibkan unit-unit dibawah naungan pemimpin pusat. Namun demikian apabila terlalu banyak penyebaran unit dan penyebaran kordinasi dikawatirkan menjadikan multidimensi wewenang dan akan memperlambat berjalannya roda unit implementor.⁵³ Sehingga dikawatirkan tiap madrasah bergerak sendiri-sendiri tanpa kendali terpusat. Dimana tiap-tiap pihak penyelenggara program Pendidikan Diniyah Formal memiliki cara sendiri-sendiri dalam menangani persoalan kemadrasahannya. Ada yang meminta bantuan pemerintah provinsi, ada yang meminta bantuan pemerintah kabupaten, ada yang meminta bantuan tokoh-tokoh Kiai sebagai corong Pendidikan Diniyah Formal. Sehingga penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal tidak tertib dan tidak terpusat.

⁵³ Supriyanto, "*Analnsi Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Studi Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Ciyosog 02 Bogor)*". Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2010.

Kurangnya kendali secara terpusat apabila dikaitkan dengan manajemen tentu saja juga menimbulkan pertanyaan bagaimana pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan itu. Dale dalam Retina Setiaji menjelaskan :

*the modern concept of control provides a historical of what has happened and provides data the enable the executive to take corrective steps.*⁵⁴

Hal ini berarti bahwa pengendalian lebih dari pada melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan kegiatan pengendalian atau pengawasan. Akan tetapi pengendalian juga memiliki arti perbaikan berkesinambungan dan pelurusan sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian bagaimana pengendalian dan pengawasan itu dapat terlaksana apabila terdapat penyebaran unit yang telalu banyak tanpa adanya kendali yang terpusat. Dan bagaimana implementasi kebijakan dapat terlaksana sementara lembaga administrasi negara (1996:159) menyebutkan pengendalian merupakan salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses manajerial untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang

⁵⁴ Retina Setiaji, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta, Deepublish :2015.164.

telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengendalian sebagai fungsi manajemen sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemimpin pada setiap unitnya. Hakikat pengendalian adalah mengantisipasi sedini mungkin akan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.



BAB IV
IMPLEMENTASI INPUT DAN PROSES PENDIDIKAN
DI MADRASAH COKROKERTOPATI TAKERAN
MAGETAN

Setelah pada bab sebelumnya telah dibahas implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal melalui sudut pandang teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, maka dalam bab ini akan dibahas implementasi dari segi input dan proses pendidikannya di madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan.

A. Implementasi Input

1. Pengelola

Pengelola Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati terdiri dari Pengasuh Pesantren: KH.MS.Zuhdi Tafsir,S.Ag, M.S. sekaligus didapuk menjadi ketua komite madrasah. Ketua Yayasan: Dr. Moch Choirul Anam, M.Pd.I Kepala PDF Ulya: Ulin Nuha, S.Pd.I, Kepala Wustho : Ulil Abshor, LC., Bendahara: Ahmad Mufid, Sekretaris: Agung Hendra Prasetyo, Kurikulum: Agus Mutok, S.Pd.I., Kepesertadidikan:

M. Wahekotin, S.Pd.I., Humas: Alim Rohmatullohi, S.H., Tata Usaha: Imam S.H.

Dan untuk kebijakan institusi Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati yaitu pengangkatan Kepala Madrasah baik Ulya maupun Wustho, pengangkatan bendahara, Waka kurikulum, Waka bidang Kepesertadidikan, dan Waka bidang humas dan Tata Usaha diangkat oleh Ketua Yayasan. Semua pengangkatan tersebut melalui Surat Keputusan (SK yang dilakukan oleh ketua Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati melalui Surat Keputusan YPI Cokrokertopati.⁵⁵

2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Secara umum, tenaga pendidik Pendidikan Diniyah Formal merupakan tenaga profesional dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan, dan mengembangkan ilmu keagamaan Islam. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, tenaga pendidik Pendidikan Diniyah Formal dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang harus dikuasai dan dihayati. Menjadi pendidik Pendidikan Diniyah Formal

⁵⁵ Wawancara ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

dituntut memiliki kualifikasi tertentu, baik kualifikasi akademik maupun kompetensi tertentu pula.⁵⁶

Di Pendidikan Diniyah Formal Cokroertopati persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik adalah memiliki kemampuan membaca kitab Islam klasik atau kitab kuning dengan baik dan berpendidikan sarjana atau tengah menempuh program sarjana.

Tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati tingkat ulya dan wustho adalah: (1) Dr. Moch Choirul Anam, M.Pd.I, (2) Ulin Nuha, S.Pd.I, (3) Ulil Abshor, LC, (4) Alim Rohmatulloh, S.H, (5) Agus Mutok, S.Pd.I, (6) Moh. Hamidi, (7) Nyoto, S.H, (8) Ahmad Mufid, (9) Agung Hendra, (10) Moh. Yusuf, (11) Abdul Wahid A, (12) Ahmad Sidiq, S.Pd.I (13) M. Wahekotin, S.Pd.I, (14) Fatkhur Ridwan, S.H, (15) Imam, S.H, (16) Moh. Irfan. Dan (17) Mohammad Syukri.⁵⁷ Dilihat dari sisi kualifikasi akademik, meskipun sembilan diantara tenaga pendidik di Cokrokertopati telah berpendidikan S1 dan bahkan ada satu orang yang telah

⁵⁶ Ahmad Dudin, *Evaluation Of Implementation of Pendidikan Diniyah Formal (Formal Relegious Education) In Pesantren Darussalam Ciamis West Java*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin No.6 Jakarta Pusat.

⁵⁷ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

berpendidikan S3. Namun terdapat tujuh tenaga pendidik yang belum sarjana. Ini artinya kualifikasi akademik pendidik di Cokrokertopati belum memenuhi standar kualifikasi akademik pendidikan diniyah formal. Meski telah diakui terdapat tujuh tenaga pendidik yang non gelar, yang sesuai persyaratan sebagai tenaga pendidik belum memenuhi kualifikasi akademik, namun sesungguhnya tujuh pendidik itu telah mencapai kualifikasi keilmuan dalam bidang kitab kuning dan merupakan alumni dan kader Cokrokertopati.

Menghadapi situasi diatas, madrasah Cokrokertopati melakukan peningkatan kualifikasi akademik dengan cara memberikan bantuan dana perkuliahan kepada tujuh tenaga pendidik yang non gelar melalui kerjasama dengan STAIM Magetan. Cara ini dianggap pilihan terbaik dan merupakan alternatif yang tepat. disebabkan madrasah Cokrokertopati kesulitan merekrut tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik sekaligus menguasai kitab-kitab kuning, upaya rekrutment sesungguhnya beberapa kali telah dilakukan. Namun demikian Cokrokertopati lebih banyak mendapatkan tenaga pendidik yang menguasai kitab kuning namun tidak memiliki gelar sehingga ditengah perjalanan Cokrokertopati

seringkali terkendala persoalan pelaporan kepada pemerintah.⁵⁸ Disamping itu kebanyakan mereka berasal dari luar Kabupaten Magetan sehingga seringkali terjadi pengunduran diri di tengah perjalanan sebab jarak tempuh menuju madrasah dapat dikatakan jauh. Madrasah Cokrokertopati juga mendapatkan tenaga pendidik yang sekaligus memiliki kualifikasi akademik dan menguasai kitab-kitab kuning, namun demikian juga sering terjadi pengunduran diri, entah disebabkan jarak tempuh yang jauh atau lebih memilih fokus dan menjaminkan masa depannya di lembaga pendidikan lainnya, sebab mereka memang juga menjadi tenaga pendidik di pendidikan formal lainnya.

Upaya rekrutmen tenaga pendidik dengan pesantren lain juga telah dilakukan, diantaranya dengan Pesantren Tremas Pacitan, Pesantren Tremas mengirimkan tenaga bantu untuk mengajar di madrasah Cokrokertopati maupun di pesantrennya. Namun demikian kebanyakan belum memiliki gelar sarjana dan sering kali mengundurkan diri ketika masa pengabdian telah habis dan harus kembali ke kampung halaman atau menikah. Dan saat ini masih tersisa dua tenaga pendidik yang berasal dari pesantren Tremas Pacitan dan menjadi guru tetap

⁵⁸ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

di Cokrokertopati sebab domisili mereka dekat dengan Takeran. Dan satu diantara telah memiliki gelar sarjana.

Sering keluar masuknya tenaga pendidik atau pengunduran diri menjadi persoalan yang dihadapi oleh Cokrokertopati. hal itu menurut Gus Aan dapat dimaklumi sebab tenaga pendidik belum menerima bantuan dana dari pengurus pendidikan diniyah formal dan pemerintah juga belum memberikan bantuan dana sertifikasi karena memang belum ada program sertifikasi tenaga pendidik pendidikan diniyah formal. Selain itu Cokrokertopati juga hanya dapat memberikan gaji kepada tenaga pendidik sebesar dua puluh ribu rupiah perjamnya.⁵⁹

Kondisi-kondisi diatas menjadi alasan mengapa Cokrokertopati lebih memilih memaksimalkan tenaga yang telah ada, dengan menjaring kader-kader terbaiknya untuk menjadi tenaga pendidik di Cokrokertopati kemudian memberikan bantuan dana perkuliahan untuk mereka, terutama yang berasal dari wilayah Takeran dan sekitarnya, yang dikemudian hari dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mengajar di madrasah Cokrokertopati.

⁵⁹ Wawancara dengan Gus Aan di gazebo Cokrokertopati pada 12 Desember 2020.

Untuk kualifikasi tenaga kependidikan Cokrokertopati memiliki seorang kepala Tata Usaha dan dua staf. Kepala Tata Usaha memiliki gelar sarjana dan dua staf belum memiliki gelar sarjana. Kepala Tata Usaha adalah Imam, S.H dan Staf adalah Agung Hendra dan Moh. Irfan. Dan yang menjadi persoalan adalah ketiga tenaga kependidikan itu sekaligus menjadi tenaga pendidik sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan. Dan sebenarnya bukan bagian Tata Usahanya saja, melainkan seluruh tenaga pendidik mengalami tumpang tindih pekerjaan. Sebab dari tujuh belas pendidik yang mukim kebanyakan dalam tenaga pendidik yang mukim di pesantren.⁶⁰ Sehingga selain menjadi tenaga pendidik di pendidikan formalnya pada tingkat ulya maupun wustho juga menjadi tenaga pendidik di pesantrennya atau kegiatan sore dan malamnya. Bahkan pendidik yang bertempat tinggal diluar pesantren yang berjumlah enam orang, dua diantaranya ikut membantu kegiatan kepesantrenannya. Seperti yang telah di bahas pada staf dalam bab III, dari sisi size sesungguhnya Cokrokertopati kekurangan jumlah tenaga pendidik. dengan jumlah tujuh belas tenaga pendidik untuk mengampu beban belajar tatap muka perminggu 52 jam pelajaran dengan durasi

⁶⁰ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

40 menit tiap jamnya dengan jumlah kelas sebanyak 6 kelas yang terdiri dari 3 kelas wustho dan 3 kelas ulya sekaligus mengampu kegiatan pesantren dan ma'had Alinya. Oleh sebab itu juga diperlukan tambahan tenaga pendidik pada tahun ini dan pada tahun berikutnya dengan cara penjaringan kader-kader yang kompeten.⁶¹

3. Peserta Didik

Peserta didik dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting disamping tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. peserta didik merupakan objek dari kebijakan sekaligus menjadi *outcomes* kebijakan di bidang pendidikan.

Dari segi jumlah, peserta didik Cokrokertopati mengalami peningkatan, terlebih setelah Cokrokertopati memiliki Pendidikan Diniyah Formal. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, saat ini Cokrokertopati memiliki 190 peserta didik yang terdiri dari paling sedikit 29 anak per rombel untuk tingkat wustho dan ulya sejak pendidikan diniyah formal muncul. Dan jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan standar pendidikan diniyah formal yaitu minimal 30 peserta didik per rombel.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Gus Aan di gazebo Cokrokertopati pada 12 Desember 2020.

⁶² Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

Dan yang menjadi persoalan adalah Cokrokertopati tidak dapat menentukan standar kompetensi calon peserta didik, karena memang para orang tua ini mendaftarkan putra-putrinya ke pesantrennya. Sedangkan prinsip pesantren adalah menerima segala macam peserta didik dan bagaimanapun model dan latar belakang pendidikan maupun keluarganya. sebagaimana yang telah jelaskan oleh Kiai Zuhdi Tafsir:⁶³

Umate nabi Muhammad iki yo macem-macem, ono sing sugih yo ono sing mlarat, modele yo bedo-bedo, yo ono sing pinter yo ono sing bodo, yo iki tugase awake dewe ngramut (Umatnya Nabi Muhammad ini bermacam-macam, terdapat yang kaya terdapat pula yang miskin, modelnya pun bermacam-macam, terdapat yang pintar terdapat pula yang miskin, ya inilah tugas kita merawat

Prinsip menerima seluruh peserta didik dari berbagai macam kalangan merupakan Cokrokertopati. namun itu juga memunculkan persoalan-persoalan baru, terutama dalam kemadrasahannya. Terdapat peserta didik yang menurut Gus Aan “ *neng SLB kepinteren, Sekolah kengisoren*” (di Sekolah Luar Biasa terlalu pintar dan disekolah biasa terlalu bodoh).⁶⁴ Kondisi itu menyulitkan madrasah dalam penilaian dalam

⁶³ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir di kediaman beliau pada 11 Oktober 2020.

⁶⁴ Wawancara dengan Gus Aan di gazebo Cokrokertopati pada 12 Desember 2020.

kenaikan kelas. Indikator apa yang hendak diambil untuk layak naik kelas, apakah kemampuan materi pelajaran ataukah indikator yang lainnya. Sehingga di ambil kebijakan madrasah tahun ini naik kelas dan tahun berikutnya tidak naik kelas dan seterusnya untuk peserta didik golongan itu.⁶⁵ selain itu terdapat peserta didik yang di daftarkan ke pesantren dalam rangka pembinaan akhlak atau motif spiritual keagamaan “*Ngalaf barokahe Kiai Hasan Ulama*” yang telah menempuh jenjang pendidikan SMP ataupun SMA. Sehingga peserta didik itu kesulitan memahami kajian-kajian kitab kuning dan membutuhkan perlakuan khusus dan target kompetensi yang berbeda dengan peserta didik yang lainnya. seperti cukup memiliki kemampuan membaca Al-Quran saja. selain itu rata-rata peserta didik di Cokrokertopati berasal dari keluarga menengah kebawah dan anak-anak yatim. Sehingga Cokrokertopati mau tidak mau mengambil kebijakan biaya pendidikan madrasah sekaligus pesantren yang terbilang cukup murah. Sebagaimana yang disampaikan ketua yayasan:

“Biaya infaq tiap bulan disini 220 ribu, 200 untuk pesantren dan makan dua kali sehari dan 20 ribu untuk tabungan santri, untuk satu keluarga adik kakak dapat membayar cukup satu bagi yang tidak mampu”

⁶⁵ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

Kondisi diatas mendorong Cokrokertopati untuk lebih memaksimalkan dana BOS untuk kelangsungan lingkup kemadrasahannya, dan sisanya ditanggung oleh yayasan.⁶⁶ Karena memang dapat dikatakan Cokrokertopati tidak memungut biaya dari para peserta didik. dan meskipun prinsip menerima segala macam, bentuk dan model peserta didik cukup beresiko, namun demikian disisi lain madrasah memang memerlukan peserta didik untuk mencukupi rombel yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Kurikulum

Menurut Waka Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati yaitu ustadz Agus Mutok, standar kurikulum Pendidikan Diniyah Formal yang telah ditetapkan pemerintah kitabnya terlalu tinggi. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian pengelola Pendidikan Diniyah Formal lain. Menurut Agus Mutok, kitab-kitab yang menjadi Pendidikan Diniyah Formal hampir sama dengan kitab-kitab untuk pada Ma'had Ali. Kalau hal ini dipertahankan menurutnya maka akan mempersulit penentuan jenjangnya. Sehingga dalam menentukan kitab-kitab ma'had ali. Selain itu kitab-kitab yang tebal juga memerlukan

⁶⁶ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

banyak waktu untuk pembelajaran sehingga mau tidak mau Cokrokertopati meminimalisasi pelajaran-pelajaran umum, bahkan pelajaran pendidikan umum telah dihilangkan untuk Ulya. Jadi perumusan ulang draft kurikulum dirasa perlu dilakukan lagi mulai kurikulum tingkat Wustho, Ulya dan Ma'had Ali. Menurut Agus Mutok juga bahwa perumusan kurikulum lebih baik merujuk pada kitab-kitab klasik daripada merujuk kompetensi. Di beberapa Pendidikan Diniyah Formal lain juga belum tegas dalam rendah tinggi kitabnya. Tapi kitab-kitab ini berdasarkan pada tradisi di pesantren asalnya saja.⁶⁷

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati pada Tingkat Wustho dan Ulya berupa pilihan strategis untuk mencerdaskan para peserta didik. Kurikulum ini disusun dan dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, mengembangkan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial, rasa keingintahuan, kreativitas, kerja sama dan etos kerja dengan mendayagunakan kemampuan intelektual dan psikomotorik. *Kedua*, lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan terencana, sehingga peserta didik dapat

⁶⁷ Wawancara dengan Ustadz Agus Mutok di kantor madrasah pada 15 Desember 2020.

menerapkan apa yang dipelajari di madrasah untuk masyarakat dan dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. *Ketiga*, mengembangkan pengetahuan, sikap spiritual dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai kondisi dan situasi di madrasah maupun masyarakat. *Keempat*, memberi keleluasaan untuk mengembangkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan. *Kelima*, kompetensi berisi kompetensi inti kelas yang telah dirinci dalam kompetensi dasar mata-pelajaran. *Keenam*, kompetensi inti merupakan pengorganisasian kompetensi dasar, dan semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran bertujuan untuk mencapai kompetensi inti. *Ketujuh*, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif dan integratif, yaitu saling memperkaya, memperkuat dan mensinergikan antar mata pelajaran.⁶⁸

Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum yang dikembangkan dengan landasan filosofis memberikan dasar bagi upaya pengembangan kapasitas peserta didik menjadi manusia yang menguasai ilmu-ilmu agama berbasis kitab kuning. Pemerintah dalam hal ini memberikan

⁶⁸ Wawancara dengan ustadz Agus Mutok di kantor madrasah pada 15 Desember 2020.

keleluasaan kepada satuan pendidikan diniyah formal untuk memilih diantara sumber-sumber kitab yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Sarana dan Prasarana

Hingga saat ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah memiliki 3 gedung bertingkat yang terdiri dari 20 ruang , 6 ruang untuk kelas, 1 ruang tata usaha yang didalamnya terdapat 4 buah computer dan dua buah laptop, 1 ruang tenaga pendidik dengan konsep lesehan sekaligus menjadi ruang perpustakaan dan 1 gudang. dan 11 ruang belum dipergunakan. Dan diantara 4 ruang yang belum dipergunakan dapat dimanfaatkan menjadi aula ketika dibutuhkan.

Di depan madrasah terdapat tempat parkir kendaraan roda dua dan terdapat halaman yang hanya cukup untuk melaksanakan apel harian. Dikarenakan keterbatasan lahan mdrasah, pelaksanaan upacara mingguan atau hari-hari besar dilaksanakan didepan masjid Jami' Takeran didepan asrama putra Cokrokertopati.

6. Pembiayaan

Dari segi sumber pembiayaan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati, menurut ustadz imam sebagai kepala Tata Usaha, sumber pembiayaan Cokrokertopati untuk

kelangsungan pendidikannya selama ini mengandalkan dana BOS. dan untuk mencukupi kekurangannya, pihak Yayasan YPI Cokrokertopati yang mencukupinya, karena madrasah tidak mengambil iuran dari peserta didik. dan yang mengambil iuran dari para peserta didik adalah pesantrennya, dan jumlahnya adalah 220.000 ribu rupiah perbulan, yang hanya dapat dipergunakan untuk biaya makan santri, dan 20.000 ribu rupiah.⁶⁹ Sehingga biaya pesantren itu tidak dapat mencukupi pembiayaan kemadrasahannya. Artinya Pembiayaan boleh dibilang kurang memadai, namun demikian pihak yayasan YPI Cokrokertopati tetap komitmen dan semangat dalam menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal yang merupakan kekuatan pesantren, terutama dalam hal pembiayaan gaji tenaga pendidik.

B. Implementasi Proses

1. Pengelolaan Satuan Pendidikan Diniyah Formal

Pengelolaan satuan pendidikan hendaknya dilaksanakan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.⁷⁰ Secara umum, pengelolaan

⁶⁹ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

⁷⁰ Abdul Basir. *Evaluasi Pendidikan.*(Surabaya: Universitas Airlangga, 1998). 28.

satuan pendidikan diniyah formal merupakan tanggung jawab pesantren. Pengelolaan satuan dengan prinsip-prinsip di atas merupakan hasil temuan dan menunjukkan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, dan tanggungjawab menjadi karakteristik Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati.

Pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal di madrasah Cokrokertopati secara umum merupakan tanggung jawab pesantren Cokrokertopati, namun demikian secara teknis kemadrasahan dipegang oleh kepala madrasah. Dalam hal ini kepala madrasah baik Ulya dan Wustho bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan kegiatan kemadrasahan dan wajib mengkomunikasikan dan melaporkan kegiatan kepada ketua YPI Cokrokertopati. kemudian mempertanggung-jawabkan kepada pengasuh pesantren sebagai komite madrasah.⁷¹

Pengelolaan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati didasarkan pada rencana kerja tahunan, dan rencana kerja tahunan itu merupakan penjabaran atas rencana kerja jangka menengah untuk 4 tahun. Dan dalam hal ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah memiliki pedoman pengelolaan madrasah dalam bentuk program pendidikan, kalender pendidikan, jadwal pelajaran dan

⁷¹ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

penyusunan kurikulum. Dan sampai saat ini Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati telah mendapatkan status terakreditasi.⁷²

2. Perencanaan Pembelajaran

Berdasarkan pengakuan Ustaz Ulin Nuha, untuk perencanaan pembelajaran di Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati, telah dilakukan penyusunan silabus oleh tenaga pendidik melalui rapat bersama berdasarkan daftar isi kitab-kitab dan buku-buku yang digunakan. Tenaga pendidik juga telah menyusun dan menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). dan dalam penyusunan silabus mengacu standar kurikulum pada standar isi pendidikan diniyah formal.

Untuk implementasi pembelajaran pada tiap semester dengan melakukan pembelajaran hanya sesuai dengan silabus dan RPP yang telah direncanakan. Artinya kitab-kitab tersebut memang tidak ditargetkan untuk khatam makna gandel atau selesai sepenuhnya, cukup tercapai kompetensi dasar dan kompetensi intinya saja. hal itu disengaja karena memang target mengkhatamkan sepenuhnya dilaksanakan pada waktu bulan puasa untuk menambal makna-makna kitab yang masih kosong. Selain itu memang ketika bulan puasa dipergunakan

⁷² Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

untuk pembacaan kitab, untuk kelas satu yang hendak naik ke kelas dua akan dibacakan kitab materi kelas dua, kelas dua yang hendak naik ke kelas tiga maka akan dibckn kitab kelas tiga. Hal itu bertujuan agar proses pembelajaran dikelas nantinya sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat, sehingga kegiatan belajar mengajar dikelas tidak habis untuk pembacaan kitab saja dan tenaga pendidik dapat memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menjelaskan, berdialog, musyawarah dengan peserta didik tentang materi yang telah dibahas. Menurut ustadz Ulin Nuha, cara itu dipilih berdasarkan pengalaman di awal-awal berdirinya pendidikan diniyah formal Cokrokertopati. di awal berdirinya, madrasah hanya terfokus untuk mengkhataamkan kitab-kitab saja, karena memang standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah cukup tinggi dan cukup banyak dengan jam yang sangat terbatas. Sehingga diawal-awal, pemahaman peserta didik tidak begitu dihiraukan. menurut istilah ustadz Ulin Nuha "*paham ora paham penting khatam*" artinya paham tidak paham yang penting khatam.⁷³

⁷³ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

3. Proses Pembelajaran

Berdasarkan pengakuan Ustaz Ulin Nuha, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tenaga pendidik untuk pendahuluan adalah mengabsen kehadiran peserta didik, mencatat peserta didik yang tidak hadir, mengecek peserta didik yang tidak memakai sepatu, mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Dan kegiatan pembelajaran inti yang dilakukan tenaga pendidik adalah membacakan kitab-kitab dengan makna jawa pegon sembari menjelaskannya. Sementara kegiatan penutup pembelajaran adalah merangkum point-point penting materi yang telah disampaikan.⁷⁴ Sementara menurut ustadz Agus Mutok kurang lebih sama dengan pengakuan ustadz Ulin Nuha.⁷⁵

4. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan tenaga pendidik dalam Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati, menurut pengakuan ustadz Ulin Nuha dan Agus Mutok metode yang sering digunakan adalah metode bandongan yaitu tenaga pendidik membacakan makna kitab dengan bahasa jawa dan peserta didik menuliskannya. Dan untuk materi-materi tertentu

⁷⁴ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

⁷⁵ Wawancara dengan Ustadz Agus Mutok di kantor madrasah pada 15 Desember 2020.

menggunakan metode praktik seperti halnya pembelajaran bahasa arab, ilmu falak dan ilmu mantiq.

Metode pembelajaran bandongan sering dilakukan oleh tenaga pendidik, sebab disisi lain tenaga pendidik juga ingin mencapai target khatam dan peserta didik juga dituntut lengkap dalam memaknai kitab-kitabnya, karena tiap semester memang diadakan pengecekan kelengkapan makna kitab. meskipun sebenarnya seperti yang dijelaskan pada perencanaan pembelajaran bahwa tenaga pendidik tidak harus mengkhatamkan kitab sepenuhnya, dan cukup mengikuti silabus dan RPP nya. Sebab untuk melengkapi makna kitab dapat dilakukan pada bulan puasa. Kendati demikian, pada prakteknya banyak tenaga pendidik yang tetap menargetkan khatam.⁷⁶

5. Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan penuturan ustadz Ulin Nuha dan Agus Mutok dalam penilaian hasil belajar, bahwa tenaga pendidik seringkali memberikan pertanyaan kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Namun demikian belum pernah dilakukan penilain hasil belajar. Bahkan pemberian test juga belum pernah dilakukan. Dan satu-satunya penilaian yang terdapat di

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadz Agus Mutok di kantor madrasah pada 15 Desember 2020.

Cokrokertopati adalah penilaian hafalan surat-surat Al-Qur'an tertentu, tahlil, kaidah-kaidah fikih dan bait-bait nahwu semacam alfiyah ibnu malik dan 'imriti.⁷⁷

6. Penilaian Peserta Didik terhadap Proses Pembelajaran.

Untuk penilaian peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Cokrokertopati, setelah memperoleh izin dari ustadz Ulin Nuha peneliti menyebarkan angket kepada 30 peserta didik Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati kelas tiga Ulya tahun 2021. kemudian dibuat tabel penilaian peserta didik terhadap proses pembelajaran dengan skala SL untuk selalu, SR untuk sering, HTP untuk hampir tidak pernah dan TP untuk tidak pernah.

Penilaian Peserta Didik Terhadap Proses Pembelajaran

No.	Pernyataan	SL	SR	HTP	TP
1.	Tenaga pendidik mengelola kelas dengan baik	8	20	2	
2.	Tenaga pendidik merespon pertanyaan peserta didik	25	5		
3.	Tenaga pendidik menilai tugas			6	24
4.	Tenaga pendidik melakukan test remedial				30

⁷⁷ Wawancara dengan Ustadz Agus Mutok di kantor madrasah pada 15 Desember 2020.

5.	Tenaga pendidik mendorong peserta didik aktif dalam pembelajaran	7	3	16	4
6.	Tenaga pendidik melakukan komunikasi dengan peserta didik	8	11	7	4
7.	Tenaga pendidik menyebutkan sumber kitab dalam pembelajaran	4	12	8	6
8.	Tenaga pendidik menutup pembelajaran dengan kesimpulan	1	4	20	5
9.	Tenaga pendidik menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya			17	13
10.	Tenaga pendidik melakukan penilaian di akhir pembelajaran			17	13
11.	Tenaga pendidik melakukan test setiap menyelesaikan satu materi				30
12.	Tenaga pendidik menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi	4	5	9	12

Berdasarkan penuturan ustadz mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan dan hasil penilaian santri tentang proses pembelajaran di madrasah Cokrokertopati maka tampak pengelolaan proses pembelajaran di kelas terdapat kekurangan,

sehingga pengelolaan proses pembelajaran ini harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan secara efektif. Karena, pengelolaan proses pembelajaran yang efektif pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar santri.

7. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Pendidikan Diniyah Formal merupakan kewenangan pengawas pendidikan Islam Kementerian Agama. Dan selama ini belum ada pengawas khusus yang datang ditugaskan untuk pembinaan dan pengawasan Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati.⁷⁸ selama ini pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan secara internal oleh Yayasan Perguruan Islam Cokrokertopati. Sehingga Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati menganggap bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati masih belum optimal.

⁷⁸ Wawancara dengan ustadz Ulin Nuha di kantor madrasah pada 10 Desember 2020.

BAB V
IMPLIKASI IMPELEMENTASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN
DINIYAH FORMAL

Setelah pada bab sebelumnya telah dibahas implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dari sisi input dan output, maka dalam bab ini akan dibahas implikasinya dari sisi kelembagaan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa Pendidikan Diniyah Formal merupakan lembaga keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada didalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal, hal itu mendorong Cokrokertopati untuk memanfaatkan momentum untuk menghidupkan kembali, mempertahankan dan memelihara pesantren Takeran sebagai pesantren.

Selama ini pesantren Takeran dihadapkan pada dilema, Seiring berkembangnya dinamika perkembangan zaman, Madrasah dan sekolah dibawah naungan pesantren Takeran semakin berkembang pesat khususnya diwilayah Takeran. Di satu pihak pesantren Takeran harus menjalankan

fungsi tradisionalnya, yaitu pendidikan dan pengajaran tradisi keislaman klasik untuk mencetak kyai, ahli agama dan da'i. Disamping dirasa perlu memberikan dasar-dasar pemahaman ilmu keagamaan kepada peserta didik yang tidak bertujuan menjadi ahli agama yang professional. Namun seiring berjalannya waktu, unsur-unsur kepesantrenan semakin terkikis oleh keberadaan madrasah atau sekolah yang berada dibawah naungan pesantren Takeran, terlebih diantara madrasahny telah dinegerikan oleh pemerintah. Sehingga minat peserta didik ke pesantren Takeran lebih sedikit dibandingkan ke madrasah atau sekolah dibawah naungannya, bahkan santri di pesantrennya sempat dapat dihitung dengan jari dan vakum kegiatan. Hal ini dirasa Kiai Zuhdi Tafsir tidak sesuai dengan sesuai dengan cita-cita para pendiri pesantren Takeran dimana unsur-unsur pesantren dan tradisi kepesantrenan tetap harus dipelihara. Ikatan antara madrasah atau sekolah dengan pesantren harus tetap dijaga.

Munawwar Rahmat dalam jurnalnya Kiai Hasan Ulama Mursyid Tarekat Shaththariah, *As a Pioneer of Modern Pesantren* menyebutkan bahwa *“Pesantren Takeran founded by Kiai Hasan Ulama in 1886 AD as the first modern pesantren that combines the benefits of school systems with boarding schools”*. *“The main subject of religious science, but not*

forgetting the general lesson,” artinya Pesantren Takeran didirikan oleh Kiai Hasan Ulama pada tahun 1886 yang juga merupakan washithah atau mursyid dalam tarekat syathariyyah. dan atas inisiatif beliau pesantren Takeran mengkombinasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah (madrasah) dan mengintegrasikan pelajaran agama Islam dan pelajaran umum.⁷⁹ namun demikian adanya kombinasi atau intregasi antara pesantren dan sekolah tidak berarti meniadakan dan menghapus sistem boarding schoolnya atau kepesantrenannya, akan tetapi unsur-unsur pesantren semestinya terus dipelihara. Pemikiran Kiai Zuhrul Mubtadin itu secara tidak langsung sejalan dengan Zamarkasy Dofir yang menyebutkan bahwa terdapat lima unsur dalam pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, kajian kitab klasik dan kiai.⁸⁰ Dengan demikian, setidaknya pesantren dapat dikatakan pesantren apabila memiliki lima unsur tersebut pada lembaganya. sehingga Kiai Zuhrul Mubtadin berharap kata pesantren pada pesantren Takeran tetap ada wujudnya dan tidak sebatas nama saja. masjid dan pondok harus terus dipelihara yang paling utama menurut beliau adalah masjid, seperti kata-kata beliau: “ *Yo onok’e bocah-*

⁷⁹ Munawwar Rahmat, Kiai Hasan Ulama Mursyid Tarekat Shaththariah, As a Pioneer of Modern Pesantren

⁸⁰ Dauliy, H.Haidar Putra, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta : Prenada Media, 2004), 27.

bocah iki supoyo nguri-nguri masjid tinggalane mbah” (Ya adanya anak-anak ini supaya dapat melestarikan masjid peninggalan kakek. Dengan adanya santri atau peserta didik yang mukim ini secara otomatis menghidupkan masjid sebagai sentra kegiatan kegiatan keagamaan Islam. Banyaknya peserta didik di madrasah dan sekolah dibawah naungan pesantren Takeran namun dirasa semacam tidak ada koneksi antara madrasah dan sekolah dengan pesantren atau masjid ini merupakan kegelisahan yang dirasakan oleh Kiai Zuhi Tafsir. Kegelisahan itu lah yang mendorong terciptanya Cokrokertopati sebagai lembaga pendidikan yang memelihara pesantren Takeran.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua tentang sejarah Cokrokertopati, Cokrokertopati awalnya merupakan pesantren salafiah, dimana santri Cokrokertopati tidak menjadi peserta didik dan tidak mengikuti pembelajaran di sekolah ataupun madrasah dibawah pesantren Takeran. Akan tetapi hanya mengikuti pembelajaran kajian-kajian keagamaan Islam di pesantrennya saja. dan setelah munculnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 dan mendapatkan progam *pilot project* progam Pendidikan Diniyah Formal itu menjadi momentum Cokrokertopati untuk memformalkan kegiatan

pendidikan keagamaan Islam itu dalam rangka memelihara pesantren Takeran dan tradisi kepesantrenannya.

Selain dalam rangka memelihara pesantren Takeran dan tradisi kepesantrenannya, Berdirinya Madrasah Cokrokertopati sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mendidik putra dan putrinya menjadi ahli-ahli dalam bidang keagamaan melalui program pendidikan diniyah formal Cokrokertopati di pesantren Takeran.⁸¹ Dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 khususnya pasal 2 yang menyatakan disebutkan bahwa penyelenggaraannya bertujuan untuk mencetak kader ahli dalam ilmu agama Islam, Kementerian Agama telah memfasilitasi Cokrokertopati untuk memberikan akses pendidikan bagi yang ingin menjadi ahli dalam bidang keagamaan Islam.

⁸¹ Wawancara dengan Kiai Zuhdi Tafsir dikediaman beliau pada 10 Oktober 2020.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal, implementasinya dari segi input maupun proses dan implikasinya terhadap kelembagaan Cokrokertopati di Takeran Magetan pada tahun 2020/2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal belum sepenuhnya terlaksana. Komunikasi dan kordinasi antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana yang belum terstruktur. Adanya disposisi antara sasaran dan tujuan kebijakan dengan persepsi para pelaksana.
2. Realitas implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati dari segi input terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik Pendidikan Diniyah Formal, standar kurikulum dari pemerintah untuk kitab-kitabnya terlalu tinggi, bahkan hampir sama dengan kitab-kitab standar kurikulum Ma'had Ali, sehinga hal itu dapat menyulitkan dalam penjenjangan

kurikulumnya dan anggaran dana yang kurang mencukupi untuk pembiayaan Pendidikan Diniyah Formal. sementara dari segi proses, manajemen Pendidikan Diniyah Formal Cokrokertopati masih belum tertata dan terkelola dengan baik, perencanaan pembelajaran yang belum standar, pengelolaan proses pembelajaran yang masih tradisional dan kurang efektif, penggunaan metode pembelajaran masih kurang variatif, penilaian hasil pembelajaran peserta didik tidak sesuai dengan prosedur sistem penilaian yang profesional, pembinaan dan pengawasan belum optimal, upaya pembinaan dan pengawasan secara periodik oleh pihak pemerintah, pengawas, dan kepala Pendidikan Diniyah Formal masih belum diperhatikan.

3. Implikasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Cokrokertopati pada aspek kelembagaan adalah paradigma formalisasi Pendidikan Diniyah, sentralisasi pesantren dalam pendidikan dan bentuk pelayanan pendidikan formal dari pesantren non salafiyah untuk kader-kader ahli agama.

B. Saran

Secara umum pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten Magetan dan madrasah Cokrokertopati hendaknya melakukan kordinasi secara intesif supaya

implementasi kebijakan sesuai sasaran dan tujuannya. Dan secara kusus bagi pemerintah provinsi Jawa timur melakukan pengawasan kepada pemerintah kabupaten Magetan. dan pemerintah kabupaten Magetan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada madrasah Cokrokertopati. Sementara madrasah Cokrokertopati hendaknya mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan mampu melaksanakan sistem jaminan mutu.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Athoillah, Anton ,”Dasar-Dasar Manajemen, Bandung, 215.

Pustaka Setia: 2017.

Arwildayanto, Sukung Arifin, Tune Sumar Warni. “Analisis Kebijakan Pendidikan, kajian teoritis Exploratif dan Aplikatif.” Bandung: *Cendekia Press*, 2018.

Basir, Abdul. “Evaluasi Pendidikan.” Surabaya: *Universitas Airlangga*, 1998.

Dauly, Putra Haidar H. “Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.” Jakarta : *Prenada Media*, 2004.

Departemen Agama RI. “Madrasah Aliyah Kejuruan, Arah dan Prospek Pengembangan.” Jakarta: *Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam* 2004.

Direktorat Jendral Pendidikan Islam. “Regulasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.” *Kementrian Agama RI* 2015.

Fatah, Nanang. “Analisis Kebijakan Pendidikan.” Bandung: *Remaja Rosdakarya*, 2014.

Handoyo, Eko. “Kebijakan Publik.” Semarang : *Widya Karya*, 2012.

Heryati Yeti, Muhsin Mumuh. “Manajemen Sumber Daya Pendidikan.” Bandung: *Pustaka Setia*, 2014 .

Indiahono, Dwiyanto. “Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis.” Yogyakarta: *Gaya Media Terbit*,2017.

Mastuhu. “Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren.” Jakarta: *INIS; Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Agama Islam* (1996/1997), *Informasi Perguruan Agama Islam*.

Marwan Sarijo. “Mereka Bicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai.” Jakarta : *Raja Garafindo Persada* 2009 DPP GUPPI.

N Dunn, William. “Pengantar Analisis Kebijakan Publik,” *Gajah Mada University Press*, Cetakan Kedua 1999.

Robert C. Bogdan, S.J. Taylor. “Introduction to Qualitative Research Methods.” New York: *John Wiley*, 1975.

Setiaji, Retna, *Manajemen Strategis*, 164 Yogyakarta, *Deepublish* :2015.

Rusdiana, H.A. “Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi.” Bandung : *Pustaka Setia* : 2015.

Subarsono. “Analisis Kebijakan Publik.” Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2020.

Dokumen

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6036 tahun 2015 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Ulya.

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6963 tahun 2017 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha.

Internet/Website:

Boss, Jeff. “Leadership Strategy” (A Simple Flow For Thingking About Organizational Alighment), *Forbess*, January 21, 2018. Diakses pada 12 Desember 2020.https://www.forbes.com/sites/jeffboss/2018/01/2/a_simple_flow_to_think_about_organizational_alignment.

Direktur Jendral Pendidikan Agama Islam., 2020, 3500 Santri Pendidikan Diniyah Formal Ikuti Imtihan Watoni /Ujian Akhir. Diakses pada 4 November 2020. http://pendis.kemenag.go.id/.../3500_Santri_Pendidikan_Diniyah_Formal_Ikuti_Imtihan_Watoni.

Jurnal Ilmiah:

Basuki Edi Pujo, Authar Nailul. Community Development Journal, Volume 2, No. 1 Juli 2018 ISSN 2580-5282.

Dewi Ratna, Limbong Jetro. "Manajemen Pendidikan Diniyah Formal." *Madrassa : Journal of Islamic Educational Management 2018*. Volume 1 (2018).

Dudin, Ahmad. "Evaluation Of Implementation of Pendidikan Diniyah Formal (Formal Religious Education) in Pesantren Darussalam Ciamis West Java." *Dialog* Volume 42 Nomor 2 Desember 2019.

HS, Abdul Wahid. "Pendidikan Diniyah Formal, Wajah Baru Pendidikan Pesantren untuk Kaderisasi Ulama." *SYAIKHUNA* Volume 7 Nomor 20 (2016).

Jamin, Ahmad. "Pendidikan Islam Sebagai Sebuah Sistem (transformasi Input Menuju Output Yang Berkarakter)." *Islamika* 15, no. 2 (August 18, 2016).

Rahmat, Munawar. "Kiai Hasan Ulama Mursyid Tarekat Shaththariah As a Pioneer of Modern Pesantren. "

Islamic Religious Education Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) Bandung, *Jurnal Pendidikan Islam* :
Volume 7, Nomor 1, June 2018/1439.

Setiawan Catur, Emirsa Esti Septina. “Analisis Kebijakan
Terkait Prioritas Pilot Project Implementasi Sistem
Informasi Menggunakan Analytical Hierarchy
Process.” *Jurnal Pekommas*, Vol. 17 No. 3, Desember
2014.

Syukron Ahmad, Samsudi, Kustiono. “Pendidikan Diniyah
Formal : a Formal Curriculum for Pesantren in
Indonesia.” *Innovative Journal of Curriculum and
Educational Technology* 9 (2) (2020).

Taufiq Muhammad, Chatib Munif. *Community Development
Journal*, Volume 2, No. 1 Juli 2018 ISSN 2580-5282.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Ahmad, Mas Tajudin. “Konsep Zuhud Perspektif Kiai Hasan
Ulama dalam Naskah ‘Anisul Muttaqin.” *Tesis
Progam Pasca Sarjana UIN Yogyakarta*. 2016.

Supriyanto, “Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Studi Kasus di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Ciyosog 02 Bogor)”. Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Progam Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 2010.

